

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA GRINTING KECAMATAN
BULAKAMBA KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)**



Oleh :

TITIS KARLENA

1806026104

Sosiologi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Titis Karlena

NIM : 1806026104

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi,



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

NIP. 19720517199803100

Brebek, 16 Juni 2022

Pembimbing

Bidang Metodologi dan Tata Tulis,



Endang Supriadi, MA

NIP. 2015098901

LEMBAR PENGESAHAN

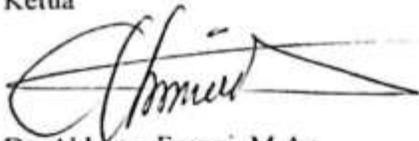
**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN
BREBES
SKRIPSI**

Disusun Oleh :
Titis Karlena
1806026104

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 04 Juli 2022 dan dinyatakan
LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Akhwan Fanani, M.Ag
NIP. 196904252000031001

Sekretaris



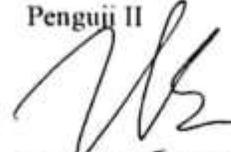
Endang Supriadi, MA
NIP. 2015098901

Penguji



Nur Hasyim, M.A
NIDN. 2023037303

Penguji II



Kaiser Almaja, M.A
NIP. 198207132016011901

Pembimbing I



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 19720517199803100

Pembimbing II



Endang Supriadi, MA
NIP. 2015098901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab di dalamnya. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan dari pihak manapun untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2021



Titis Karlana
1806026104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”**. Penulisan skripsi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tidak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan kita nantikan syafaat-Nya di Yaumul Akhir. Untuk sampai pada tahapan ini, banyak sekali suka duka yang penulis rasakan. Demikian pula, telah banyak dukungan yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.
4. Akhriadi Sofian, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag. Selaku dosen pembimbing I yang telah memberi saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Endang Supriadi, M.A. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi sosiologi.

8. Orang tua terkasih Bapak Caswadi dan Ibu Damah (Alm) yang senantiasa memberikan doa restu, serta cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat berada dititik sekarang.
9. Kakak tercinta kak Lina dan kak Sriwiyunti yang selalu memberikan dukungan dan arahan penuh kepada penulis.
10. Sahabat tersayang Purwantri Sundariyanti, Saleha Mashita Rahmah dan Indri Jayanti yang selalu menjadi tempat dalam mencurahkan isi hati dan setia menemani hari-hari penulis saat menyusun tugas skripsi.
11. Informan dan pengurus BUMDes Grinting yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian.
12. Teman-teman Sosiologi C yang tidak mampu penulis sebut satu persatu, tetap semangat dan salam sukses untuk kawan-kawan seperjuangan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha sebisa mungkin untuk mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil riset yang dapat berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun oenulis harapkan sebagai pembelajaran untuk pencapaian yang lebih baik di masa depan.

Semarang, 30 Juni 2022



Titis Karlana

1806026104

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya skripsi dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Karya ini penulis persembahkan pertama, untuk kedua orang tua yaitu Bapak Caswadi dan Ibu Damah (Almh) yang telah memberikan dukungan penuh dalam mejalani pembelajaran hidup. Khususnya almarhumah ibu berkat doa-doanya penulis bisa berada dititik sekarang, walau tak dapat mendampingi lagi secara fisik namun ibu selalu ada dihati. Atas kerja keras dan pengorbanan kedua orang tua yang selalu memanjatkan doa untuk anak-anaknya agar diberikan hidup yang lebih baik, hingga mampu menghantarkan penulis sebagai seorang sarjana untuk almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang sebagai tempat menimba ilmu yang tidak akan pernah terlupakan.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d ayat 11).

Rasulullah bersabda : “Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (H.R. Muslim).

ABSTRAK

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2020 Kabupaten Brebes masuk ke dalam kabupaten termiskin se-Jawa Tengah nomor 3 dengan tingkat kemiskinan sebesar 17%. Oleh sebab itu, Kabupaten Brebes telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui penguatan BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses serta dampak dari adanya BUMDes bagi masyarakat. Sehingga penting untuk diketahui bahwa BUMDes apabila dapat dikelola dengan baik akan membantu menyelesaikan persoalan perekonomian yang menjadi masalah krusial bangsa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara detail mengenai suatu individu atau kelompok dan keadaan atau gejala yang terjadi. Dalam penyajian informasi dapat berupa naskah atau gambar sehingga dapat memasukkan kutipan panjang, pendek dan bervariasi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data induktif yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dampak keberadaan BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Grinting, berperan dalam pemberdayaan dan pemberian akses pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan potensi kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui unit usaha dalam BUMDes. Proses pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Grinting, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya, diantaranya ada faktor pendorong yaitu bonus demografi, siklus ekonomi desa yang dinamis dan pemerintah desa yang responsif. Sementara untuk faktor penghambat yaitu keterbatasan modal, keterbatasan SDM, sikap dan perilaku masyarakat, serta persaingan produk/jasa.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perekonomian, Pengembangan Masyarakat, BUMDes.

ABSTRACT

According to BPS (Central Statistics Agency) in 2020 Brebes Regency is the poorest district in Central Java number 3 with a poverty rate of 17%. Therefore, Brebes Regency has sought various ways to reduce poverty, one of which is through strengthening BUMDes. BUMDes is a business institution managed by the village government in an effort to strengthen the economy which is formed based on the needs and potential of the village. The purpose of this research is to find out how the process and the impact of the existence of BUMDes on the community. So it is important to know that BUMDes if it can be managed properly will help solve economic problems which are crucial problems for the Indonesian nation.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which provides a detailed description of an individual or group and the circumstances or symptoms that occur. In presenting information, it can be in the form of text or images so that it can include long, short and varied quotes. Collecting data using participatory observation techniques, in-depth interviews, documentation and literature review. The data analysis used in this research is inductive data analysis which is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are the impact of the existence of BUMDes on the economic empowerment of the Grinting Village community, playing a role in empowering and providing access to services to the community and developing the potential economic capacity of rural communities to improve social welfare through business units within the BUMDes. The process of managing community economic empowerment carried out by BUMDes Grinting, there are several driving factors and inhibiting factors that affect its implementation, including the driving factors, namely demographic bonuses, dynamic village economic cycles and responsive village government. Meanwhile, the inhibiting factors are limited capital, limited human resources, public attitudes and behavior, and product/service competition.

Keywords: Empowerment, Economy, Community Development, BUMDes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Peneletian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JIM IFE.....	27
A. Definisi Konseptual	27
1. Pemberdayaan Masyarakat	27
2. Pendekatan Berbasis Hak Pada Pengembangan Masyarakat	30
3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).....	32
B. Teori Jim Ife : Mencapai Pemberdayaan Masyarakat.....	34
<u>BAB III</u> DESA GRINTING SEBAGAI LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Desa Grinting	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Kondisi Demografis	43
3. Kondisi Topografis	47
B. Profil Desa Grinting.....	48
1. Sejarah Desa Grinting	48

2.	Struktur Pemerintahan Desa Grinting	50
C.	Profil BUMDes Grinting	53
1.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa	53
2.	Permodalan BUMDes	55
3.	Inventaris BUMDes Grinting	56
<u>BAB IV</u> PROSES PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES		58
A.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Pada BUMDes Grinting	58
1.	Unit Usaha Pengelolaan Sampah	61
2.	Unit Usaha Pasar Desa	61
3.	Unit Usaha Lumbung Pangan	62
4.	Unit Kelompok Perempuan	62
5.	Unit Badan Kredit Desa	63
6.	Unit Usaha Kesamsatan	64
7.	Unit Usaha Kios Pupuk Lengkap	64
B.	Faktor Pendorong Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting	66
1.	Bonus Demografis	66
2.	Siklus Ekonomi Desa Yang Dinamis	67
3.	Pemerintah Desa Yang Responsif	67
C.	Faktor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting	67
1.	Keterbatasan modal	69
2.	Keterbatasan SDM	70
3.	Sikap dan perilaku masyarakat	70
4.	Persaingan jasa/produk sejenis	70
<u>BAB V</u> DAMPAK KEBERADAAN BUMDES TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES		73
A.	Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes.	73
1.	Kondisi Sebelum Adanya BUMDes Grinting	73
a)	Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan	73
b)	Pengelolaan Pasar Sarat Akan Pungutan Liar	74
c)	Sebatas Pinjaman Uang	74
d)	Kurangnya Pengetahuan Kaum Perempuan Tentang Berwirausaha	75

e)	Masyarakat Meminjam Uang ke Rentenir Dengan Bunga Tinggi	75
f)	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan	76
g)	Petani Beli Pupuk Non-subsidi Dengan Harga yang Relatif Mahal	76
2.	Kondisi Sesudah Adanya BUMDes Grinting	76
a)	Unit Usaha Pengelolaan sampah.....	77
b)	Unit Usaha Pengelolaan pasar.....	78
c)	Unit Usaha Lumbung Pangan	79
d)	Unit Usaha Kelompok Perempuan (Grinting Food)	79
e)	Badan Kredit Desa	81
f)	Kesamsatan	82
g)	Unit Usaha Kios Pupuk Lengkap.....	82
B.	Implikasi Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	88
1.	<i>Enabling</i>	89
2.	<i>Empowering</i>	89
3.	<i>Protecting</i>	90
BAB VI	PENUTUP	92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perspektif Kekuasaan Atas Pemberdayaan.....	31
Tabel 1.2 Sumber Modal BUMDes Grinting.....	35
Tabel 1.3 Indikator Keberdayaan.....	39
Tabel 1.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	44
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	45
Tabel 1.6 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Grinting	46
Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Grinting	47
Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
Tabel 1.9 Sarana Prasaranan Keagamaan Desa Grinting	49
Tabel 1.10 Nama Kepala Desa dan Periode Jabatan	52
Tabel 1.11 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Grinting	53
Tabel 1.12 Susunan Kepengurusan BUMDes Grinting.....	56
Tabel 1.13 Permodalan BUMDes Grinting	57
Tabel 1.14 Inventaris BUMDes Grinting	58
Tabel 1.15 Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes Grinting	86
Tabel 1.16 Program Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Unit Usaha	87
Tabel 1.17 Omset Usaha Dari Tahun 2017 s/d 2020.....	89
Tabel 1.18 Alokasi Dana Pendapatan BUMDes Grinting	90
Tabel 1.19 Relevansi Teori Dengan Langkah-langkah BUMDes	93
Tabel 1.20 Kegiatan Usaha BUMDes Grinting	61
Tabel 1.21 Jenis dan Harga Pupuk Pada Unit Usaha Pupuk Subsidi	67
Tabel 1.22 Tantangan dan Strategi Unit Usaha	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Grinting.....	42
Gambar 1.2 Gapura Desa Grinting	50
Gambar 1.3 Logo BUMDes Grinting	55
Gambar 1.4 Rapat Bersama Pengurus BUMDes Grinting	60
Gambar 1.5 MUSRENBANGDES	62
Gambar 1.6 Pameran UMKM Grinting Food.....	64
Gambar 1.7 Kondisi Area Persawahan Setelah Adanya BUMDes Grinting	79
Gambar 1.8 Produk Olahan Makanan Khas Grinting Food.....	82
Gambar 1.9 Proses Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan nasional, wilayah pedesaan memiliki posisi dan peran yang cukup strategis. Hal tersebut disebabkan karena penduduk Indonesia sebagai penggerak dan sasaran pembangunan pada umumnya bermukim di wilayah pedesaan. Selain itu, wilayah pedesaan memiliki peran penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Secara teoritik keamanan nasional suatu negara dapat terwujud jika masyarakat dapat memperoleh penghidupan yang layak untuk melestarikan keberlanjutan kehidupan. Menyadari bahwa wilayah pedesaan memiliki arti penting dalam keberlangsungan dan kedaulatan bangsa, maka pemerintah sangat menaruh perhatian yang cukup serius dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah pedesaan dari berbagai sektor. Keseriusan tersebut ditunjukkan oleh pemerintah yang tergabung dalam kabinet kerja dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Rosaliza, 2016). Hal tersebut merupakan suatu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan Al-Qur'an surah Ar Ra'd ayat 11 tentang pengembangan masyarakat:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Departemen Agama, 1987: 41).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2020 Kabupaten Brebes masuk ke dalam kabupaten termiskin se-Jawa Tengah nomor 3 setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan sebesar 17%. Oleh sebab itu, Kabupaten Brebes telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui penguatan BUMDes. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang desa, salah satu pembangunan perekonomian berbasis hukum adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial (Brawijaya, 2007). Prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan sosial diterapkan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dalam

proses pendirian perekonomian pedesaan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memfasilitasi desa untuk mengembangkan potensi melalui dana desa, yaitu dana pembangunan yang didesentralisasikan bagi desa sebagai proporsi tertentu dari APBD dan APBN yang ditujukan untuk pemerataan keuangan desa (Herry, 2015). Pengaturan BUMDes diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan (Dewi, 2014).

BUMDes Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes didirikan pada 16 September 2016, dengan dasar hukum dari PERDES No. 05 Tahun 2016 dan SK Kepala Desa No. 146/17/2016, yang bertempat di kantor Balai Desa Grinting. Kondisi BUMDes Grinting bisa dikatakan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari Laporan Perkembangan Pendapatan BUMDes tahun 2017 sebanyak 96.304.000, 144.793.000 (2018), 172.056.000 (2019), hingga 220.707.000 pada tahun 2020. Dalam proses kegiatan pemerintah Desa Grinting juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pemberdayaan. Seperti pengelolaan sampah pada tahun 2020 ada 9.021 pelanggan yang dibagi menjadi 5 wilayah. Selain itu, ada pengelolaan pasar desa terdiri dari 60 pedagang yang menjajakan berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, ada 35 anggota pada program bidang usaha perempuan yang memproduksi olahan makanan khas Desa Grinting yang didistribusikan ke rest area, bandara dan tokoh oleh-oleh. Serta lumbung pangan terdiri dari 80 anggota, badan kredit desa 40 pelaku UMKM. Kesamsatan dalam hal ini merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BUMDES Grinting sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor Samsat dan BRI Link yang keanggotaanya tidak tetap (Khalimi, 2020).

Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan maka secara tidak langsung telah memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi dinamika perubahan pada tingkat regional, nasional maupun global. Hal ini merupakan sebuah modal sosial yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi bekal masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Bagaimana tidak, modal sosial yang

dimaksud disini adalah dengan adanya peran aktif masyarakat dapat dengan mudah merealisasikan program-program yang telah dibuat oleh BUMDes Grinting melalui kegiatan pemberdayaan. Kehadiran modal sosial dalam pembangunan dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan kehidupan masyarakat, memberikan stimulus kepada masyarakat untuk bergerak melakukan perubahan secara masif, menumbuhkan kesadaran bersama untuk memperbaiki kualitas tatanan kehidupan masyarakat dan mencari kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan (Haridison, 2017).

Pada temuan pra-peneliti, menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan di Desa Grinting cenderung monoton. Misalnya pada pengelolaan sampah, yang masih menggunakan kendaraan seperti Tossa. Padahal wilayah di Desa Grinting cukup luas terbagi menjadi 5 wilayah/RW dengan 37 RT hanya memiliki 6 Tossa dgn kondisi 4 baik 2 rusak. Sehingga pengerjaanya menjadi kurang efisien. Kemudian pada pengelolaan pasar yang belum tertata dengan baik. Desa Grinting memiliki 2 pasar terletak di pertengahan dan ujung pedesaan. Kedua pasar tersebut memiliki kondisi bangunan tidak permanen hanya berupa meja yang dijejer di pinggir jalan. Sehingga ketika hujan pedagang tidak bisa berjualan. Padahal pasar adalah salah satu pusat perekonomian sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pada bidang usaha perempuan yang mengolah berbagai makanan khas Desa Grinting menurun akibat pandemi karena kehilangan pasar. Serta beberapa program kegiatan BUMDes lainnya yang masih perlu diperhatikan perkembangannya. Apalagi dengan pendapatan yang cukup besar dan meningkat setiap tahun seharusnya, ada inovasi baru dalam pengembangan program pemberdayaan untuk masyarakat (Khalimi, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses setiap bidang usaha dalam BUMDes, lalu dampak dari adanya BUMDes bagi masyarakat. Karena penting untuk diketahui bahwa BUMDes apabila dapat dikelola dengan baik akan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa terutama persoalan perekonomian yang menjadi masalah krusial bangsa Indonesia. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah

Suapaya pokok permasalahan tidak meluas serta pembahasan mencapai titik yang jelas maka, penulis memusatkan objek penelitian yang sesuai dengan tema yaitu ”Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana dampak BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Untuk mengetahui dampak BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis memberi masukan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui unit usaha dalam BUMDes Grinting.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini BUMDes Grinting untuk merumuskan kebijakan, masalah penanganan dan pengembangan masyarakat.
- b. Sebagai tambahan data dan informasi untuk studi lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang proses pemberdayaan serta dampak dari adanya BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Grinting. Selain itu, pembaca dapat mengetahui bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program pemberdayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil eksplorasi awal tentang penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan studi ini menunjukkan, bahwa kajian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan ketidaksamaan dalam pembahasan dan fokus kajian dengan penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang dikategorisasikan berdasarkan definisi konseptual yang terdapat pada tema penelitian. Untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pertama, terbit pada tahun 2018 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Budidaya Ikan Nila Kabupaten Muaro Jambi”. Ditulis oleh Abdul Kobit mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan sebagai berikut: Pemberdayaan yang dilakukan di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi sudah dianggap cukup berpengaruh. Dampak bagi perekonomian masyarakat adalah taraf hidup menjadi lebih baik, sebagai contoh dalam aspek kesejahteraan dan pendidikan. Faktor penghambat dari proses pemberdayaan antara lain persaingan, kekurangan dana dan hama penyakit pada ikan nila. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pemberdayaan adalah melalui pengembangan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam berbudidaya ikan nila di Kabupaten Muaro Jambi.

Kedua, terbit pada tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hono Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara”. Ditulis oleh Aisra Sarah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak dari penelitian ini berpengaruh bagi perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Apalagi sejak adanya publisitas yang dilakukan oleh

pemerintah setempat. Keuntungan yang didapat bisa sampai berlipat ganda. Sehingga program pemberdayaan tersebut berdampak positif bagi penduduk di Desa Hono.

Ketiga, terbit tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara”. Ditulis oleh Rian Kandra mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian sebagai berikut: Masyarakat sudah terberdaya, dari yang sebelumnya tidak berdaya dengan adanya pemberdayaan sekarang sudah ada peningkatan. Kendala yang terjadi adalah modal yang dimiliki masih tergolong sedikit. Keterbatasan lahan untuk berkebun atau keterbatasan lahan yang dekat dengan hutan. Respon masyarakat terkait dengan pemberdayaan tersebut adalah respon positif.

Keempat, terbit pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Pangan Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lampisang Kabupaten Aceh Besar”. Ditulis oleh Warzuqni Syahfitri Ismy mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pemberdayaan melalui industry rumahan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Pilar-pilar pemberdayaan menurut pandangan ekonomi islam konsistensi dari masyarakat dalam merintis usaha rumahan dalam hal ini berkaitan dengan ikhtiyar dalam Islam.

Kelima, terbit tahun 2018 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pogram Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat”. Ditulis oleh Evliyani mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan

dalam penelitian ini yaitu Peran aktif dari masyarakat yang ikut serta dalam kerjasama melaksanakan program pemberdayaan. Dilihat dari tahap demi tahap yang dilakukan dengan baik oleh masyarakat. Keberhasilan program tersebut terjadi karena didukung oleh pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah melakukan transparansi dalam laporan keuangan. Sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam merealisasikan program pemberdayaan.

2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pertama, terbit pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”. Ditulis oleh Munawarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi program pemberdayaan yang masih terjaga dan dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dampak dari adanya BUMDes Majasari dianggap telah memberikan dampak yang positif. Seperti peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pengembangan keterampilan dan pendidikan latihan yang terkait dengan potensi dari masyarakat.

Kedua, terbit pada tahun 2019 dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kabupaten Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Ditulis oleh Hartini mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Keberadaan BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat atau penduduk di Desa Batetangga. Hal ini dikarenakan keberadaan BUMDes membawa dampak atau pengaruh yang baik. Sebagai contoh meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Batetangga. Hal ini juga selaras dengan pilar-pilar dari pandangan Islam mengenai pemberdayaan yaitu bekerja merupakan salah satu kegiatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain.

Ketiga, terbit pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tero”. Ditulis oleh Romadhon mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Teluk Pandan Rambahan yaitu: BUMDes *Brokering & Serving*, BUMDes *Tranding*. Faktor penghambat dalam proses pengelolaan program BUMDes pada penelitian ini adalah tidak berkembangnya usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya promosi dan kreatifitas. Akan tetapi hal ini harus diatasi oleh pengurus untuk selalu melakukan atau membuat inovasi dalam pengelolaan BUMDes. Program pemberdayaan tersebut berdampak positif bagi masyarakat. salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan sosial. sementara problemnya adalah persaingan produk sejenis. Program pemberdayaan berperan dalam meminimalisir angka pengangguran karena, dari adanya program pemberdayaan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Keempat, terbit pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Ditulis oleh Adi Firmansyah mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk melihat pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas dan efisiensi pada program pemberdayaan ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan BUMDes di Kecamatan Tanete Riaji belum mampu mengolah program dengan baik yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yaitu kemandirian dalam berwirausaha. hal ini dapat diatasi dengan peningkatan atau pengembangan keterampilan melalui program pemberdayaan.

Kelima, terbit pada tahun 2018 dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Ditulis oleh Nofiratullah mahasiswa jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus yang dilaksanakan selama dua siklus pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen/data, dan foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Adapun dampak positif dan dampak negatif dari adanya BUMDes yaitu dampak positif adalah tingkat keaktifan BUMDes masih terjaga dan dikelola dengan baik. Sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat desa. Dampak negatifnya adalah keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat mengelola BUMDes serta kurangnya peran aktif masyarakat. Solusi yang dapat diambil adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang keberadaan BUMDes di Desa Soki

Selain perbedaan tempat dan waktu pelaksanaan berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Grinting. Melalui berbagai unit usaha yaitu seperti : Unit Pasar Desa, Unit Pengelolaan Sampah, Unit Lumbung Pangan Desa, Unit Usaha Kelompok Perempuan, Unit Badan Kredit Desa, Unit Usaha Kesamsatan dan Unit Kios Pupuk Lengkap. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dan peranan BUMDes serta metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a) Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Sulistiyani, 2004). Masyarakat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan. Hal ini disebabkan

karena dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu diposisikan sebagai aktor utama dari mulai perencanaan sampai proses evaluasi. Secara sederhana masyarakat dapat dikatakan berdaya apabila mampu mengidentifikasi masalah dan mengatasinya secara mandiri. Mandiri dalam arti masyarakat memahami akan situasi tataran hidup yang menjadi tujuan dengan bekerja sama untuk mencapainya.

Pada dasarnya pemberdayaan mempunyai hakikat sebagai salah satu cara yang dapat diambil untuk mengupayakan masyarakat agar mampu mengadakan dan menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Seperti yang diketahui bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab keterbatasan masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan kehidupan. Sebagai contoh karena faktor kemiskinan, masyarakat kesulitan dalam mengakses pengetahuan, pelayanan, teknologi, informasi dan sumber-sumber penting lainnya dalam kehidupan. Sehingga melalui program-program pemberdayaan BUMDes Grinting ingin membantu meleluaskan masyarakat yang belum berdaya dengan memberikan kemudahan dalam mengakses sumber-sumber kehidupan. Hal ini dilakukan BUMDes Grinting dalam mengupayakan kesetaraan hak-hak masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat agar terciptanya kemandirian masyarakat. Melepaskan masyarakat dari ketertinggalan, ketergantungan dan kesulitan dalam mengakses sumber-sumber kehidupan. Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang selama ini dibatasi oleh jurang kemiskinan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kemudahan sehingga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan demikian dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat.

b) Pemberdayaan Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat

Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (2014) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara

teoritis pengembangan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (Sosial-Marxis) dan kanan (Kapitalis-Demokratis) dalam spektrum politik (Suharto, 2014). Hubungan antara pengembangan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat terletak pada konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan adalah bagian dari pengembangan masyarakat.

Twelvetrees (1991) membagi perspektif teoritis pengembangan masyarakat kedalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), *“This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation”*. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan profesional bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sementara pendekatan radikal bermatra transformasional (Suharto, 2014).

Berdasarkan pandangan mengenai pemberdayaan dalam perspektif pengembangan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan merupakan unsur dalam pengembangan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat bagian dari pengembangan masyarakat atau sebuah cara dan usaha dalam mengembangkan masyarakat. Pada dua pendekatan profesional dan pendekatan radikal dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek pengembangan masyarakat yang meliputi :

- 1) Perawatan masyarakat, ialah kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Kegiatan ini bersifat sukarela atau tidak dibayar.
- 2) Pengorganisasian masyarakat, merupakan kegiatan yang berfokus pada perbaikan sistem antar kelembagaan sosial.
- 3) Pembangunan masyarakat, merupakan kegiatan yang mempunyai fokus pada pengembangan potensi kemampuan masyarakat untuk dapat mandiri dalam memecahkan permasalahan.
- 4) Aksi masyarakat berdasarkan penggolongan kelas, yang mempunyai tujuan utama atau fokus dalam mengolah atau memberikan cara penyelesaian konflik.
- 5) Aksi masyarakat berdasarkan penggolongan gender, yang mempunyai tujuan untuk merubah hubungan-hubungan patriarkhi antara perempuan dengan laki-laki, gender dan negara, hingga orang dewasa dengan anak-anak.
- 6) Aksi masyarakat berdasarkan penggolongan ras (warna kulit) ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan menekan masalah diskriminasi sosial (Suharto, 2014).

c). BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Sementara desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri. Dengan demikian, BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersil pada umumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).

- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal *local wisdom*.
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa *village policy*.
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, Dan Pemdes.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota).
- 8) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah (Maryunani, 2008).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes Grinting diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu memperkokoh perekonomian desa melalui program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable. Dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional (Brawijaya, 2007). Disamping itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat BUMDes Grinting harus mengedepankan aspek pembangunan agar tercapai kemajuan ekonomi yang diharapkan. Sebagai contoh BUMDes Grinting harus mampu membaca peluang pasar dari produk maupun jasa yang dihasilkan. Tentunya dengan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

2. Teori Jim Ife : Jenis-jenis Kekuasaan Pada Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan *Powerless* atau keterbatasan dalam mengakses pelayanan. Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, yaitu sebagai berikut :

- a) Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup

Salah satu konsekuensi utama dari kemiskinan adalah bahwa orang memiliki sedikit pilihan atau kekuasaan untuk membuat keputusan tentang hidup

mereka sendiri. Struktur-struktur dan nilai-nilai patriarkhi sering membatasi kekuasaan perempuan dalam membuat pilihan-pilihan pribadi dan opresi rasial bekerja untuk mereduksi kekuasaan ini bagi masyarakat pribumi dan anggota etnis minoritas. Norma-norma dan nilai kultural yang diabadikan oleh wacana dominan dalam lingkup yang bersangkutan dapat juga membatasi kekuasaan orang atas pilihan pribadi, tanpa memandang kelas, ras dan gender. Oleh karena itu, suatu strategi pemberdayaan akan berupaya memaksimalkan pilihan-pilihan efektif orang, dalam rangka untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan pribadi mereka.

b) Kekuasaan untuk mempertahankan HAM

Dalam pertimbangan yang luas mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan HAM dengan mempertahankan hak yang dipertahankannya seperti kebebasan berbicara atau kebebasan berkumpul telah memperkuat kekuasaannya. Mereka tidak mengupayakan untuk membuat suara-suara kaum yang dirugikan dan termarginalisasi menjadi terdengar. Dalam tindakan-tindakan pelanggaran HAM mereka memilih untuk tidak menghargai konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka yang merupakan suatu pelanggaran atas keselamatan dan kehidupan manusia dari manusi-manusia lain yang tidak bersalah. Sehingga diperlukan suatu proses pemberdayaan yang akan menjamin bahwa suara-suara ini didengarkan dan akan terlibat dalam strategi-strategi aksi sosial dan politik untuk menuntut bahwa hak-hak pihak lain dipertahankan.

c) Kekuasaan atas definisi kebutuhan

Masyarakat modern seringkali diidentikan dengan kediktatoran atas kebutuhan, dimana kebutuhan yang dimaksud sudah ada yang menetapkan. Akan tetapi bukan oleh masyarakat yang mengalami hal tersebut. Kondisi pada rezim sosialis kebutuhan masyarakat seringkali ditetapkan oleh negara. Pada pandangan tentang pemberdayaan memiliki hak dan kuasa atas pendefinisian kebutuhan merupakan bagian dari pemberdayaan itu sendiri.

d) Kekuasaan atas gagasan

Pada prosesnya, pemberdayaan tidak boleh mendikte atau memaksakan pandangan seseorang tentang kehidupannya. Pemberdayaan harus memberikan

kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berfikir dan mengekspresikan pikiran-pikiran tersebut di area publik. Pemberdayaan juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berdialog dan menyumbangkan pikiran-pikiran tersebut diarah publik. Pada proses ini pemberdayaan harus memperhatikan aspek pendidikan (dalam arti yang paling luas).

e) Kekuasaan atas lembaga-lembaga

Melalui sistem lembaga sosial, seperti kesehatan, sistem pendidikan, pemerintahan dan perekonomian yang terkadang dapat melemahkan masyarakat. Agar mencapai keseimbangan pemberdayaan harus berfungsi untuk memberikan kekuasaan masyarakat atas pengaruh sistem kelembagaan. Dengan melakukan atau memberikan bekal kepada masyarakat supaya dapat berdampak terhadap sistem kelembagaan tersebut. Terutama dalam kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali.

f) Kekuasaan atas sumberdaya

Salah satu yang menjadi ciri dari masyarakat modern adalah ketidakadilan atas akses kepada sumberdaya. Sehingga kehadiran pemberdayaan diharapkan dapat mengupayakan kekuasaan yang efektif bagi semua masyarakat secara maksimal. Dengan demikian sumberdaya dapat dimanfaatkan atau dijangkau oleh semua masyarakat.

g) Kekuasaan atas kegiatan ekonomi

Melalui sistem kapitalisme terkadang dapat melemahkan masyarakat, bahkan masyarakat bisa saja kehilangan sebagian kesempatan atau haknya untuk melakukan kegiatan perekonomian. Melalui mekanisme pasar seperti memproduksi, pendistribusian dan penukaran adalah hal penting dalam proses perekonomian masyarakat. Sehingga keberadaan pemberdayaan diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

h) Kekuasaan atas reproduksi

Pengkategorian perbedaan ras, kelas dan gender menjadi salah satu isu feminis yang menarik untuk dibahas akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan kekuasaan atas proses reproduksi seringkali terjadi ketidakadilan. Sehingga keberadaan pemberdayaan diharapkan dapat menuntaskan ketidakadilan tersebut. Sebagaimana

dibahas di atas proses reproduksi cukup penting untuk menuntut sebuah kategori bagi dirinya sendiri (Ife, 2008).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara detail mengenai suatu individu atau kelompok mengenai suatu keadaan atau gejala yang terjadi. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji merupakan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat dinamis (berubah). Dengan menggunakan metode kualitatif memudahkan peneliti untuk mencari dan mengolah sumber data. Selain itu, deskriptif kualitatif merupakan penelitian ekplorasi dan memainkan peranan penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variabel sosial (Bungin, 2007). Penelitian kualitatif bertumpu pada Triangulation Data yang dihasilkan dari tiga metode yaitu : *interview* (wawancara), *participan to observation* dan telaah catatan organisasi. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen, dan rekaman yang tersedia.

2. Sumber Data

a). Data Primer

Sumber primer merupakan data yang ditemukan secara langsung oleh penulis dari objek yang menjadi fokus utama penelitian. Untuk mendapatkan data primer, penulis harus melakukan penggalian informasi dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Grinting (Sumarsono, 2004).

b). Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang ditemukan oleh penulis secara tidak langsung (dalam hal ini proses penemuan penelitian) dari objek yang menjadi fokus utama penelitian. Data yang ditemukan penulis berupa catatan atau dokumen yang dipersembahkan oleh informan atau narasumber penelitian maupun pihak yang berkaitan dengan objek penelitian (Sumarsono, 2004).

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara Mendalam

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui kontak langsung dengan informan (Koentjaraningrat, 1993). Untuk memperoleh data kredibel maka perlu memperhatikan pemilihan informan yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive atau pengambilan data dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Subadi, 2006). Penulis menggunakan jenis wawancara mendalam tujuannya adalah untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai aktivitas, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan. Hubungan antara pewawancara dengan informan dibangun dalam suasana biasa sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari yang tidak formal.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan wawancara kepada informan sesuai dengan kriteria keikutsertaan dalam program pemberdayaan terhitung sejak awal berdirinya BUMDes atau unit usaha. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi akurat mengenai peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Grinting. Oleh sebab itu, penulis perlu melakukan wawancara kepada para informan yaitu sebagai berikut :

- 1) Direktur BUMDes (Bapak Dadi Fakur, S.P)
- 2) Pelanggan Unit Usaha Pengelolaan Sampah (Ibu Watimi)
- 3) Pedagang (Ibu Kasnah)
- 4) Pelanggan Kesamsatan (Bapak Sidik Hartono)
- 5) Anggota Unit Kelompok Perempuan (Ibu Darmi)
- 6) Nasabah Badan Kredit Desa (Ibu Korisah)
- 7) Petani (Bapak Tanali)
- 8) Kepala Unit Kios Pupuk Lengkap (Bapak Restu Septino)
- 9) Kepala Unit Pengelolaan Sampah (Bapak Sutambi)
- 10) Kepala Unit Pengelolaan Pasar (Bapak Kisnodo)

b). Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana penulis terlibat dalam keseharian informan dalam hal ini penulis mengamati langsung aktivitas BUMDes Grinting. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2015). Pada penelitian ini, penulis mengamati secara langsung dan lebih mendalam terhadap fakta-fakta di lapangan terkait dengan proses pengelolaan BUMDes Grinting.

Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi, berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi (Hasanah, 2007). Salah satu keuntungan dari pengamatan langsung/observasi ini adalah bahwa sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak ruangan serta peralatan dan formulir yang digunakan serta sangat membantu untuk melihat proses beserta kendala-kendala di lapangan. Dalam hal ini penulis dapat mengamati langsung proses pengelolaan pemberdayaan masyarakat Desa Grinting melalui program-program yang dirancang oleh BUMDes serta menganalisis kendala-kendala di lapangan. Selain itu, perlu diketahui bahwa teknik observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem (Sutabri, 2012).

c). Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Hal ini merupakan bagian penting dari teknik pengumpulan data yang harus dilakukan untuk memudahkan penulis dalam mencari atau memahami data. Apalagi pada era digitalisasi semua memerlukan cara dokumentasi untuk memudahkan penelitian. Dari dokumentasi tersebut akan tergambar atau terlihat objek yang menjadi fokus utama penelitian. Sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis yang sedang melakukan penelitian (Arikunto, 2006).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif dengan pendekatan induktif yaitu metode yang pada proses pikirnya diawali dari khusus mengarah keumum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Serta penulis akan terpusat pada pencarian jawaban untuk memperoleh pengetahuan baru (Yustika, 2003). Terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman, 1992).

a). Reduksi Data

Merupakan proses pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian. Pada proses ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk membantu atau memudahkan kegiatan penelitian antara lain; dengan menentukan konsep penelitian, menemukan permasalahan/problem, langkah selanjutnya adalah melakukan tahapan penelitian menggunakan pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.

b). Penyajian Data

Merupakan tahapan penelitian setelah mereduksi data, pada tahapan ini proses penelitian selanjutnya melakukan kegiatan menyajikan data dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Supaya fenomena-fenomena yang terjadi atau yang sedang diteliti dapat dapat terbaca dengan baik. Penyajian data dilakukan melalui tabel, diagram, ataupun catatan-catatan yang ditemui di lapangan. Untuk menunjukkan keterkaitan, perbandingan atau pun pengaruh yang terdapat pada fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

c). Penarikan Kesimpulan

Proses menganalisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dimana pada proses ini penulis harus bisa membaca hasil dari apa yang diteliti atau bisa dikatakan proses ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat penulis. Dengan analisis yang menggunakan konsep logika untuk menemukan pernyataan baru dari hasil penelitian. Diharapkan proses ini dapat menemukan jawaban dan memecahkan permasalahan serta mencari solusi. Sehingga dapat memberikan kesimpulan akhir yang jelas.

Dalam tahapan analisis data ini, proses awalnya yaitu mereduksi data dari yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh penulis. Melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahapan ini penulis juga harus menyederhanakan dan mengkategorikan data agar dapat memudahkan penulis dalam membaca informasi. Kemudian tahap menyajikan data secara sistematis agar data yang dihasilkan dapat terlihat menarik dan mudah untuk dipahami. Penyajian data berupa catatan di lapangan, tabel ataupun grafik. Setelah itu, kemudian sampailah pada tahap penarikan kesimpulan yaitu mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis untuk memecahkan dan mencari solusi yang dapat dilakukan (Rijali, 2018).

H. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan suatu bentuk tulisan yang sistematis, dengan ini penulis menyusun rancangan proposal masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk itu sistematika penulisan rancangan proposal adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JIM IFE

- A. Definisi Konseptual
 - 1. Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Pendekatan Berbasis Hak Pada Pengembangan Masyarakat
 - 3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
- B. Teori Jim Ife : Mencapai Pemberdayaan Masyarakat

BAB III : DESA GRINTING SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Grinting
 - 1. Kondisi Geografis

2. Kondisi Demografis
 3. Kondisi Topografis
- B. Profil Desa Grinting
1. Sejarah Desa Grinting
 2. Struktur Pemerintahan Desa Grinting
- C. Profil BUMDes Grinting
1. Pendirian BUMDes Grinting
 2. Permodalan BUMDes Grinting
 3. Inventaris BUMDes Grinting

BAB IV : PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES.

- A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Pada BUMDes Grinting
- B. Faktor Pendorong Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting
- C. Faktor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting

BAB V : DAMPAK BUMDES TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES.

- A. Kondisi Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDes.
- B. Implikasi Teori Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JIM IFE

A. Definisi Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni : konsep *Power* (daya) dan konsep *Disadvantaged* (ketimpangan). Bagaimana pun cara orang memandang pemberdayaan tidak akan lepas dari adanya kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan kedalam tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum ‘berpunya’ kepada kaum ‘tidak berpunya’ (Ife, 2008). Oleh karena itu, perlu diperlihatkan bahwa penggunaan suatu model pemberdayaan tidak cukup memberikan perhatian kepada konsep kekuasaan. Pada hakikatnya kekuasaan adalah suatu gagasan yang kompleks dan diperdebatkan. Perspektif-perspektif sosial politik atas kekuasaan, yang menyangkut upaya untuk memahami sifat kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat, dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu :

a) Perspektif Pluralis

Pada perspektif pluralis, penjelasan mengenai pemberdayaan dipandang sebagai kompetisi yang menggambarkan sistem politik antar individu (sebagai contoh; pemimpin masyarakat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat) dan antar kelompok (sebagai contoh; lembaga sosial atau lembaga pendidikan). Makna atau maksud dari kekuasaan disini adalah dengan adanya kekuasaan seseorang dapat berpengaruh dalam pembuatan suatu kebijakan atau peraturan tentu saja dengan sistem kekuasaan yang bersaing. Untuk dapat berpengaruh dalam suatu kebijakan seseorang diharuskan mengetahui cara kerja dan aturan main dari sebuah proses tersebut. Pengertian tentang pandangan pluralis sangat berhubungan dengan sistem demokrasi. Hal ini dimaksudkan dengan kesamaan dan kesetaraan dan kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya. Selain itu, semua orang juga berhak atas keikutsertaan dalam berpartisipasi. Tidak ada satu orang pun yang dibeda-bedakan atau ditinggikan, semua orang dianggap memiliki kesempatan yang sama dimata pandangan pluralisme. Kesimpulan dari pandangan pluralis, pemberdayaan dimaksudkan untuk melindungi individu atau kelompok

yang telah dirugikan untuk berkompetisi secara sehat. Dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat serta memanfaatkan keterampilan-keterampilan tersebut. Memberikan pelajaran kepada individu dalam melakukan permainan yang sesuai dengan aturan main.

b) Perspektif Elite

Pada perspektif ini, dapat diketahui bahwa keberadaan sistem, kelembagaan atau sejenisnya seringkali justru dapat melemahkan masyarakat. Pemihakan kepada sesuatu yang dianggap mempunyai *Power* atau kekuatan terkadang melupakan aspek sosial dalam hal ini masyarakat yang tidak berdaya. Pada pandangan elite mengenai penjelasan kekuasaan sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan. Berbeda dengan perspektif pluralis, perspektif ini menganggap bahwa proses kekuasaan bukanlah suatu permainan yang siapa saja bisa menang. Tanpa adanya kekuatan lebih yang dimiliki oleh individu atau kelompok tak akan mampu mencapai kemenangan yang diharapkan. Atas kekuasaan tersebut aturan main tidak akan bersifat netral atau murni dari kecurangan. Bisa saja aturan main sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan tertentu atau kepentingan tertentu yang dapat menguntungkan pihak elite. Sehingga masyarakat yang tak berdaya inilah yang menjadi permainan mereka. Dengan dirampas haknya, diabaikan suaranya, dan tak dianggap keberadaannya. Dengan demikian pemberdayaan dituntut untuk mampu bersikap adil dan memihak masyarakat yang lemah dan tak berdaya. Pemihakan ini bukan hanya sekedar mengakui keberadaan masyarakat yang lemah akan tetapi, memberikan dukungan, kekuatan dan fasilitas untuk masyarakat agar terberdayakan.

c) Perspektif Struktural

Pada pandangan ini, menjelaskan bahwa adanya kekuatan lebih dari kekuasaan mengakibatkan masyarakat yang dianggap tidak berdaya seolah-olah dikontrol oleh kekuasaan tersebut. Masyarakat seakan-akan dibatasi oleh suatu sistem yang merampas kebebasannya. Sehingga dalam struktur sosial terdapat jurang ketimpangan sosial antara masyarakat yang tidak berdaya dengan masyarakat yang berdaya atau mempunyai *Power* atau kekuatan. Ketidakadilan ini akan terus terjadi apabila tidak diselesaikan dengan cara yang bijak.

Seharusnya dalam upaya pemberdayaan tidak boleh memihak pengaruh dominan. Pemberdayaan harus dapat memperjuangkan atau mengkampanyekan kesetaraan dalam semua hal. Untuk melindungi hak-hak masyarakat yang lemah dan tidak berdaya sekaligus mempertahankan hak-haknya dalam arti kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan tanpa memandang perbedaan kelas, ras dan gender.

d) Perspektif Post-struktural

Perspektif ini berfokus pada aspek pengetahuan mengenai definisi pemberdayaan itu sendiri. Pandangan ini bertumpu pada pengalaman subjektif dari pada keberadaan objektifitasnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah suatu pemberdayaan dipahami melalui cara-cara, pembuatan ide atau gagasan, sebagai mekanisme pengawas yang diprioritaskan. Dengan demikian dari penjelasan mengenai perspektif post-struktural dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diprioritaskan pada aspek pengetahuan atau intelektual dari pada aksi atau aktifitas. (Ife, 2008).

Tabel 1.1

Perspektif Kekuasaan Atas Pemberdayaan

Perspektif	Pandangan atas masyarakat	Pandangan atas kekuasaan	pemberdayaan
Pluralis	Kepentingan-kepentingan yang berkompetisi.	Kapasitas untuk bersaing dengan berhasil, pemenang dan pecundang.	Mengajarkan individu atau kelompok cara bersaing dalam lingkup aturan.
Elite	Dikontrol oleh elite yang melanggengkan diri sendiri.	Dilakukan terutama oleh para elite melalui pemilikan dan control atas lembaga-lembaga.	Bergabung dan memengaruhi elite, mengkonfrontasi dan berupaya mengubah elite.

Structural	Berstrata sesuai dengan bentuk-bentuk operasi <u>struktural</u> : kelas, ras, dan gender.	Dilakukan oleh kelompok-kelompok dominan melalui struktur-struktur operasi.	Pembebasan, perubahan structural mendasar, menantang struktur-struktur operasi.
Post-struktural	Didefinisikan melalui pengertian yang <u>dikonstruksikan</u> : pengertian-pengertian Bahasa, akumulasi, dan control pengetahuan.	Dilakukan melalui control atas wacana, konstruksi pengetahuan dll.	Perubahan wacana, mengembangkan pemahaman subjektif yang baru, memvalidasi suara-suara lain, membebaskan pendidikan (Ife, 2008).

Sumber : Jim Ife (*Community Development*) Tahun 2006 hal 137.

2. Pendekatan Berbasis Hak Pada Pengembangan Masyarakat

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite professional dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Sebagaimana dengan yang sudah disebutkan hal tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan HAM dan perlindungan terhadap HAM.

HAM adalah sebuah komponen vital dari pengembangan masyarakat. Prinsip yang mendasar adalah bahwa pengembangan masyarakat seharusnya berupaya menegaskan HAM dan seharusnya memungkinkan orang mewujudkan dan melaksanakan HAM mereka dan terlindung dari pelanggaran HAM. Mengadopsi suatu pendekatan hak-hak karena terdapat sinergi yang jelas antara hak-hak dan masyarakat merupakan hal yang masuk akal bagi pengembangan masyarakat. HAM berkaitan dengan masyarakat dalam beberapa cara. Jim Ife (2004), dengan jelas melontarkan hal ini:

- a) Hak dan tanggung jawab yang berjalan beriringan. Mempunyai hak berarti menyadari adanya hak orang lain. Tidak hanya itu, ketika berbicara atau membahas persoalan hak maka tidak akan lepas dari pembahasan mengenai tanggung jawab. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Sehingga dalam memaknai hak seseorang tidak dapat berjalan sendirian, karena pemenuhan hak membutuhkan orang lain. Dengan demikian, dibutuhkan sesuatu ide pokok tentang masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
- b) Apabila seseorang mempunyai hak, maka tidak akan terlepas dari pemenuhan kewajiban yang merupakan hak orang lain. Sehingga masyarakat harus mendukung kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk bebas mengekspresikan diri, hak memperoleh kesehatan, hak mengakses ilmu pengetahuan. Hal ini juga berkaitan dengan partisipasi dimana dapat mengharuskan seseorang berperan dalam memainkan proses kewarganegaraan.
- c) Mengkampanyekan HAM memerlukan proses yang tidak mudah, rumit dan terkadang beresiko. Proses ini membutuhkan kerjasama dengan individu yang telah dirugikan yang keberadaannya tidak dianggap, yang suaranya dibiarkan begitu saja. Hal ini merupakan proses pemberdayaan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan masyarakat. Dalam proses ini pemihakan terhadap kaum yang lemah sangat diperlukan. Untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas sebelumnya.
- d) Pemberdayaan pada masyarakat tentu saja memerlukan pemenuhan hak-hak dan kewajiban individu atau kelompok. Hak untuk mengadakan atau memberikan kebebasan masyarakat dalam ikut serta atau berpartisipasi atas proses yang menjadi pilihan masyarakat. Hak untuk menghargai perbedaan pilihan, perbedaan pendapat dan perbedaan sudut pandang. Akhirnya Jim Ife menunjuk kepada sebuah sinergi linguistik antara pengembangan masyarakat dan HAM yang secara gamblang menyoroti hubungan antara keduanya Ia mengatakan : “Pengembangan masyarakat melihat tujuannya sebagai pembentukan masyarakat manusia, sementara HAM menekankan tujuan mencapai suatu kemanusiaan yang diterima

bersama. Kedua istilah tersebut baik secara linguistik maupun semantik adalah serupa, bila tidak sinonim (Ife, 2008).

Diskusi di atas memberi kesan bahwa HAM adalah sebuah konsep yang kompleks, diperdebatkan dan dinamis. Jika pengembangan masyarakat mengadopsi HAM hanya seperti apa yang tampak dalam banyak piagam hak-hak (*Charters of Rights*), maka itu tidak akan merupakan kerangka yang mencukupi bagi pengembangan masyarakat. *Pertama*, suatu pandangan legalitas yang sempit terhadap HAM, sementara diperlukan adalah tidak mencukupi untuk suatu perwujudan HAM. Resep-resep legal HAM akan menolong menjamin standar-standar minimum diikuti, tidak akan mengarah kepada suatu standar optimum dari hak-hak. Sebagai contoh, legislasi anti-diskriminasi tidak akan menangani rasisme. *Kedua*, suatu kerangka legal menguntungkan hak-hak yang lebih dapat diterima untuk dilindungi di pengadilan, dan arena proses-proses dipengadilan adalah mahal, kerangka semacam itu dapat menyingkirkan klaim-klaim hak-hak dari mereka yang lebih lemah dalam masyarakat (Ife, 2008).

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes merupakan suatu perangkat yang didalamnya terdapat struktur-struktur yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Pendirian BUMDes ditujukan untuk proses pendayagunaan potensi masyarakat pedesaan untuk memajukan perekonomian desa. Apabila BUMDes dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap pendapatan desa. Peningkatan pendapatan ini akan diberikan atau dianggarkan kembali untuk pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan. BUMDes Grinting didirikan pada tanggal 26 September 2016 yang diberi nama slogan 'BUMDes Moncer' yang artinya 'bersinar'. Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDes Grinting berpedoman pada :

- a). UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDes.
- b). UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- c). UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang desa.
- d). PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDes.

- e). Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.
- f). Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 7 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- g).Peraturan Desa Grinting Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Grinting.

Awal mula dalam pendiriannya BUMDes Grinting hanya bermodalkan cita-cita, ide gagasan dan tujuan untuk kemajuan desa. Dalam hal ini BUMDes sama sekali tidak mempunyai modal. Seperti yang diketahui bahwa apapun segala bentuk pemberdayaan pasti membutuhkan yang namanya modal. Akan tetapi dengan niat dan tekad yang kuat untuk memajukan perekonomian desa dan menyejahterakan masyarakat, BUMDes Grinting berani mengambil resiko tersebut. BUMDes Grinting mencoba melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu pemerintah desa dengan usaha dan program yang potensial sehingga realisasi pendirian BUMDes dapat terlaksana dengan baik sampai sekarang.

Pemilikan Modal Awal Tahun 2017 yang diterima BUMDes adalah modal yang diterima keseluruhan oleh BUMDes dari Pemerintah Desa untuk 1 (satu) unit usaha yaitu Pengelolaan Sampah dan pembelian sarana perkantoran dengan jumlah total modal awal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah). Kemudian pada perkembangannya modal tahun 2017-2021 telah mendapatkan modal awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada tahun 2017, BUMDes Grinting memperoleh penambahan modal sebagai perkembangan usaha total sebesar Rp. 525.406.225,- seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Sumber Modal BUMDes Grinting

No.	Tahun	APDES	Laba Usaha	Bangub	Kem PDT	Bank	Total
1.	2017	200.000.000	6.109.500	-	-	25.000.000	206.109.500
2.	2018	-	15.563.475	-	50.000.000	-	90.563.475

3.	2019	50.000.000	15.896.500	20.000.000	-	-	85.896.500
4.	2020	-	19.394.250	20.000.000	-	-	39.394.250
5.	2021	80.000.000	23.443.000	-	-	-	103.443.000
	Jumlah	330.000.000	80.406.225	40.000.000	50.000.000	25.000.000	103.443.000

Sumber : Profil BUMDes Grinting 2021

Pada setiap akhir tahun, Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja selama 1 (satu) tahun kegiatan. Laporan tahunan disampaikan dalam sebuah rapat musyawarah desa yang khusus diselenggarakan untuk menyampaikan perkembangan BUMDes yang telah dicapai. Laporan perkembangan dimaksud meliputi : pendapatan, biaya usaha, laba/untung, distribusi laba/untung, dan hambatan dan peluang, serta rencana tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat atas transparansi dana dan agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

B. Teori Jim Ife : Mencapai Pemberdayaan Masyarakat

Dalam buku yang berjudul *Communnity Development* (2008), Jim Ife menjelaskan bahwa gagasan pemberdayaan (*Empowerment*) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM, ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Lebih lanjut, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*The Disadvantaged*) (Ife, 2008). Dalam hal ini pentingnya peran lembaga yang mempunyai kekuasaan dan wewenang sangat bertanggung jawab atas masyarakat yang tak diberdayakan karena pemberdayaan merupakan bagian dari perspektif keadilan sosial dan HAM. Pandangan ini berkaitan dimana setiap orang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan itu sendiri.

Jim Ife (1995) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Martono, 2014). Artinya bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan masyarakat khususnya kelompok rentan atau

lemah untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan, kepemilikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

- a) *Enabling*, membuat keadaan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai potensi atau kemampuan yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang hidup tanpa diberikan kekuatan atau daya. Besar kecilnya kekuatan tergantung pada proses pengembangan daya itu sendiri. Dengan demikian tugas pemberdayaan adalah memberikan motivasi, membangkitkan potensi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat.
- b) *Empowering*, memperkuat kemampuan masyarakat dengan cara membuat program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berkembangnya potensi masyarakat. Mencapai pemberdayaan dengan terciptanya kemandirian masyarakat atau membantu masyarakat untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupan dengan mudah seperti pendidikan, pengetahuan, informasi serta pusat perekonomian.
- c) *Protecting*, memberikan perlindungan. Arti dari perlindungan disini adalah memihak masyarakat yang tidak berdaya, melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari ancaman-ancaman yang dapat merampas hak-hak masyarakat. Kemudian adalah mempertahankan hak-hak masyarakat untuk selalu dijaga dari pelanggaran hak yang seringkali dilakukan oleh kaum yang dianggap mempunyai *Power*, atau kekuatan yang disalahgunakan (Mardikanto, 2019).

Didalam teori ini, pemberdayaan tidak hanya melulu soal pelatihan ataupun kursus semata tetapi pemberdayaan masyarakat kaitanya dengan peranan BUMDes Grinting disini lebih menekankan pada pemberian akses untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Teori ini

juga berkaitan dengan peranan BUMDes melalui unit usaha dan program-program pemberdayaan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai inisiator yang dapat menggerakkan laju perekonomian pedesaan. Melalui usaha tersebut diharapkan BUMDes Grinting dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan desa. Dari meningkatnya pendapatan desa, akan digunakan juga untuk pembangunan desa yang lebih baik. Untuk itu partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam merealisasikan program-program BUMDes karena, strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama dalam pembangunan.

Rees (1991) dan Friedman (1992) beragam strategi yang telah diusulkan dalam rangka untuk mencapai pemberdayaan dari kelompok-kelompok yang dirugikan. Strategi-strategi ini dapat secara luas diklasifikasi di bawah judul-judul kebijakan dan perencanaan, aksi sosial, politik, pendidikan dan penyadartahunan.

Pemberdayaan melalui kebijakan yang telah dibuat dan direncanakan dapat dicapai dengan memberikan akses yang sama terhadap sumber-sumber kehidupan atau pelayanan yang ada pada kehidupan masyarakat. Kebijakan yang telah dibuat kemudian diatur sedemikian rupa untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang telah dirugikan oleh pihak-pihak yang dianggap mempunyai *Power* atau menggunakannya untuk melanggar hak-hak masyarakat yang tidak berdaya untuk kepentingan pribadi. Pada konteks pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Grinting yaitu pengadaan unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka.

Pembuatan peraturan-peraturan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran. Upaya ini masuk kedalam konteks pemberdayaan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari pendapatan melalui pekerjaan. Hal ini dapat juga disebut pemberdayaan atau pemberian daya kepada masyarakat. Kaitannya dengan BUMDes Grinting adalah pembuatan unit-unit usaha secara tidak langsung telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Desa Grinting. Mulai dari direktur, pengurus, kepala unit usaha, anggota unit usaha hingga pengawas.

Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, maksud dari hal ini adalah proses politik terkadang dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan demikian hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Dimana masyarakat harus mengetahui bahwa peran politik sangat berpengaruh terhadap efektivitas program pemberdayaan. Sehingga masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan agar mereka dapat memilih dan ikut berkontribusi dalam arena politik.

Pemberdayaan melalui pengetahuan atau edukasi. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam proses pemahaman tentang keberdayaan. Membantu masyarakat dalam peningkatan keterampilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan demi perubahan yang lebih baik (Ife, 2008).

Tabel 1.3
Indikator Keberdayaan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.	~Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. ~Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. ~Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat.	~Kepercayaan diri dan kebahagiaan. ~Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. ~Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain. ~Keinginan untuk mengontrol jumlah anak.	~ <i>Assertiveness</i> dan otonomi. ~Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik. ~Keinginan terlibat dalam prose-proses budaya, hukum dan politik.

<p>Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.</p>	<p>~Akses terhadap pelayanan keuangan mikro. ~Akses terhadap pendapatan. ~Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. ~Akses terhadap pasar. ~Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak.</p>	<p>~Keterampilan termasuk kemelekan huruf. ~Status kesehatan dan gizi. ~Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. ~Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public.</p>	<p>~Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah ~Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan ~Kemampuan menghilangkan hambatan normal yang merintang akses terhadap proses, hukum politik dan kebudayaan.</p>
<p>Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p>	<p>~Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. ~Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga. ~Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga ~Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses dan sumber dan pasar.</p>	<p>~Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. ~Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>~Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat. ~Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.</p>

<p>Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.</p>	<p>~Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan public dan modern. ~Mampu memberi gaji terhadap orang lain. ~Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.</p>	<p>~Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. ~Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public.</p>	<p>~Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. ~Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. ~Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politik, hukum pada tingkat masyarakat dan makro (Suharto, 2014).</p>
---	--	--	--

Sumber : Edi Suharto (*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*) tahun 2014 hal 65.

BAB III

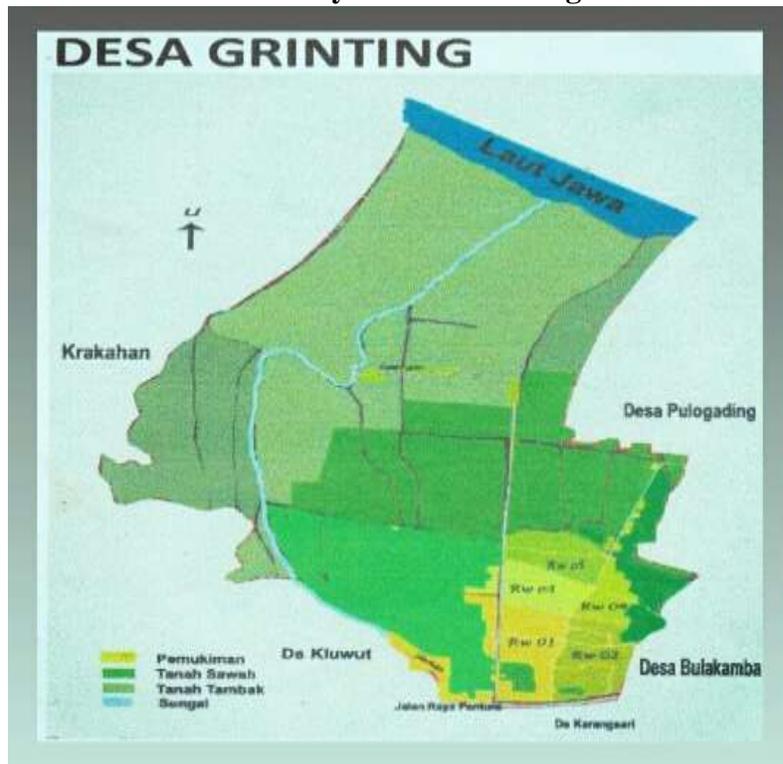
DESA GRINTING SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Grinting

1. Kondisi Geografis

Desa Grinting berdasarkan letak astronomis berada pada koordinasi 108.93125 Bujur Timur, - 6.852329 Lintang Selatan. Desa Grinting termasuk salah satu dari sembilan belas desa yang ada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Sebuah Kabupaten yang berada paling barat di propinsi Jawa Tengah, sekaligus daerah penghasil bawang merah dan telur asin. Letaknya yang berada di jalur pantura (pantai utara) menjadikannya sebagai desa yang dinamis dan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Adapun batas-batas Desa Grinting yaitu sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah selatan dibatasi Jalan Raya Pantura, sebelah barat dibatasi Desa Kluwut / Krakahan, sebelah timur dibatasi Desa Pulogading.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Desa Grinting



Sumber : SID PRODESKEL 2021

Desa Grinting memiliki visi dan misi yang tercantum dalam LKKPDes (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020). Visi dan misi Desa Grinting telah disusun melalui serangkaian musyawarah dan diskusi formal maupun informal dengan melibatkan peran aktif masyarakat Desa Grinting guna mewujudkan kemajuan desa sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Visi dan misi Desa Grinting yang telah disepakati bersama diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Grinting.

Visi

“Terwujudnya pelayanan masyarakat Desa Grinting yang optimal dan menyeluruh, menuju desa yang maju, mandiri, berdikari, sehat serta sejahtera dalam keadilan dan adil dalam kesejahteraan.”

Misi

- a) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan masyarakat yang baik.
- b) Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Meningkatkan sumber daya masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa.
- e) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
- f) Penanggulangan bencana yang tepat dan tanggap.

Desa Grinting merupakan desa dengan letak geografis tergolong strategis sesuai dengan kondisi geografisnya yang dilalui jalur pantura dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Sehingga Desa Grinting termasuk kedalam desa pesisir di Kabupaten Brebes. Desa Grinting memiliki iklim tropis terbagi dalam 2 (dua) musim yaitu musim kemarau yang terjadi sejak bulan April sampai dengan bulan September dan musim penghujan yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, serta peralihan musim yaitu antara musim kemarau dengan musim hujan, yang sering disebut dengan musim pancaroba. Desa Grinting memiliki intensitas curah hujan rata-rata pertahun yaitu sekitar 2400 mm/th, dengan suhu rata-rata sekitar 32°C. Sedangkan luas wilayah Desa

Grinting adalah 1.475,9810 (Ha) dengan 200 (m) tinggi di atas permukaan laut. Jadi sangat cocok apabila penggunaan lahan diperuntukan untuk menanam bawang merah, salah satu hasil bumi khas daerah Brebes.

Tabel 1.4
Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Jenis Tanah	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah sawah	Sawah Irigasi Teknis	252,50
		Sawah Tadah Hujan	225,00
		Sawah Pasang Surut	1,00
2.	Tanah Kering	Tegal/Ladang	0.700
		Pemukiman	201.00
		Pekarangan	27,500
3.	Tanah Basah	Tanah Rawa	15,00
		Pasang Surut	615,900
		Lahan Gambut	20,00
		Situ/Waduk/Danau	0,00
4.	Tanah Perkebunan	Perkebunan Rakyat	0,00
		Perkebunan Negara	0,00
		Perkebunan Swasta	0,00
		Perkebunan Perorangan	78,00

Sumber : SID PRODESKEL 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanah basah mendominasi penggunaan lahan di Desa Grinting yaitu seluas 650,900 (Ha) hal ini dikarenakan letak desa yang berbatasan dengan laut jawa sehingga termasuk ke dalam desa pesisir di Kabupaten Brebes. Sementara penggunaan lahan selanjutnya ialah persawahan seluas 278,500 (Ha) dan perkebunan seluas 78,000 (Ha) hal ini menandakan bahwa mayoritas matapencaharian masyarakat di Desa Grinting adalah sebagai petani/pekebun dan nelayan.

2. Kondisi Demografis

a) Jumlah Penduduk

Desa Grinting berdiri tahun 1945 dengan dasar hukum pembentukan Perdes No. 141/02/IX/1960 luas wilayah 1.475,9810 (Ha) dengan jumlah penduduk sekitar 19.467 jiwa . Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan kurang lebih 4 km, sedangkan jarak dari Pusat Pemerintahan Kota kurang lebih 14 Km adapun jarak dari Ibukota Provinsi kurang lebih 190 Km. Dari banyaknya jumlah penduduk dan dilihat dari luas wilayah Desa Grinting memiliki potensi dalam rangka menunjang pembangunan demi kemajuan desa. Desa Grinting memiliki sebanyak 10.197 KK, dan terbagi kedalam 05 RW, dan 57 RT dengan 9.862 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 9.605 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga kepadatan penduduk (per/km) yaitu 1.319 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 7.150 penduduk. Berdasarkan hal tersebut Desa Grinting cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan komposisi antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang. Secara lebih jelasnya pemerintah Desa Grinting telah menetapkan antara jumlah penduduk dengan jenis kelamin yaitu :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	967	1.112	2.079
5 – 9	1.409	1.059	2.468
10 – 14	1.011	1.006	2.017
15 – 19	837	759	1.596
20 – 24	791	686	1.477
25 – 29	1.647	1.677	3.324
30 – 39	1.086	1.121	2.207
40 – 49	920	948	1.868
50 – 59	751	782	1.533
60 dst	443	455	898
Jumlah	9.862	9.605	19.467

Sumber : SID PRODESKEKEL 2021

Tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di atas dapat disimpulkan bahwa persebaran penduduk dimasing-masing umur terpaut begitu jauh. Akan tetapi antara jumlah kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidak memiliki selisih yang jauh atau bisa dibilang pertumbuhan penduduknya cukup seimbang. Tercatat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki paling banyak didominasi oleh kelompok rentang umur antara 25 - 29 tahun yaitu sebanyak 1.647 jiwa, sementara paling sedikit yaitu rentang umur 60 tahun sebanyak 443 jiwa. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan paling banyak didominasi oleh rentang umur antara 25 – 29 tahun yaitu sebanyak 1.677 jiwa, sementara paling sedikit rentang umur antara 60 tahun yaitu sebanyak 455 jiwa.

b) Jenis Pekerjaan

Dilihat dari tabel luas wilayah menurut penggunaan mayoritas matapecaharian masyarakat di Desa Grinting sebagai petani/pekebun dan nelayan. Namun sepertinya sekarang masyarakat sudah mulai beralih ke wirausaha, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pedagang disepanjang jalan utama desa. Apalagi setelah adanya kawasan industry disepanjang Jalan Pantura yang dilakukan oleh pemerintah Kota Brebes sebagai upaya menanggulangi masalah pengangguran. Sekarang masyarakat khususnya usia produktif sudah tidak lagi mengandalkan sektor pertanian dalam hal pekerjaan. Adapun pabrik-pabrik yang telah dibangun mulai dari pabrik tekstil, pabrik gula, hingga pabrik rokok sangat berpengaruh pada pendapatan daerah.

Tabel 1.6
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Grinting

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	4.810
2.	Buruh Tani	4.120
3.	Nelayan	515
4.	Pengusaha	448
5.	Peternak	642
6.	Pekebun	374
7.	Buruh Migran	89

8.	Pedagang	1.536
9.	Buruh Pabrik	783
10.	PNS	54
11.	Anggota Legislatif	3
12.	Perangkat Desa	14
Jumlah		13.388 Penduduk

Sumber : SID PRODESKEKEL 2021

Berdasarkan tabel tersebut mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Grinting mengandalkan sektor pertanian yaitu petani sebanyak 4.810, buruh tani sebanyak 4.120 dan pekebun sebanyak 374 penduduk. Mayoritas selanjutnya pada kelompok usaha yaitu pedagang sebanyak 1.536 dan pengusaha sebanyak 448. Jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit terdapat pada jenis pekerjaan anggota legislative yaitu sebanyak 3 penduduk.

c) Pendidikan

Tabel 1.7

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Grinting

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat Perguruan Tinggi	1.065
2.	Tamat SMA	980
3.	Belum Tamat SMA	350
4.	Tamat SMP	1.730
5.	Tidak tamat smp	1.182
6.	Belum Tamat SMP	405
7.	Tamat SD	2.000
8.	Tidak Tamat SD	639
9.	Belum Tamat SD	466
10.	TK dan Kelompok Bermain	570
Jumlah		9.387 Penduduk

Sumber : SID PRODESKEKEL 2021

Berdasarkan tabel tersebut penulis menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Grinting mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan pada jumlah penduduk yang sedang atau sudah tamat perguruan tinggi sebanyak 1.065. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Desa Grinting sudah menyadari pentingnya pendidikan. Kemudian tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pada tingkat pendidikan tamat SD yaitu sebanyak 2.000 penduduk. Kedua pada tamat SMP yaitu sebanyak 1.730 penduduk. Kemudian jumlah paling sedikit yaitu belum tamat SMA yaitu sebanyak 350 penduduk.

d) Agama

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	9.862	9.605	19.467

Sumber : SID PRODESKEKEL 2021

Desa Grinting termasuk kedalam desa dengan tingkat homogenitas penduduk yang masih tinggi seperti semua masyarakat desa bersuku jawa, beragama islam dan tidak ada pembedaan kelas sosial begitu pula dalam tata letak pemukiman. Tak hanya itu, terdapat juga organisasi Islam telah ada dan berkembang di Desa Grinting, seperti organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bahkan organisasi otonom dari kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut telah terbentuk, diantaranya organisasi Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Muslimat Fatayat, Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Serta Aisyiyah dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) untuk Muhammadiyah.

Kedua organisasi tersebut telah memberikan sumbangsih besar dan berarti bagi perkembangan dan peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Desa Grinting. Diakui oleh bapak Soehartono, SH. MH selaku Kepala Desa Grinting, bahwa organisasi-organisasi itulah yang banyak mengadakan kegiatan dan aktif serta peduli terhadap kemajuan desa. Syiar Islam di Desa Grinting semakin semarak dengan adanya pengajian Tahlil dan Dziba'iyah yang dilakukan oleh Ibu-Ibu dan remaja. Kegiatan semacam ini sudah lama ada dan sampai sekarang tetap dilestarikan secara turun temurun.

Tabel 1.9
Sarana Prasarana Keagamaan Desa Grinting

No.	Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan Islam	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushollah	37
3.	Madrasah Diniyah	2
4.	Taman Pendidikan Al-Quran	5
5.	Taman Kanak-kanak Islam (TKIT)	2
6.	Pesantren	1

Sumber : Laporan Monografi Desa Grinting 2021

Dengan penduduk yang semuanya beragama Islam, maka tidak mengherankan jika terdapat banyak masjid dan musholla sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah dan pusat kegiatan da'wah atau syiar Islam. Dimana Desa Grinting terdapat 6 masjid dan 37 mushollah. Disamping itu, terdapat beberapa unit pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyyah, TK Islam, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta pesantren sebagai wadah untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anak.

3. Kondisi Topografis

Desa Grinting merupakan salah satu desa tepi pantai/pesisir di Kabupaten Brebes. Letaknya yang berada di jalur pantura (pantai utara) menjadikannya sebagai desa yang dinamis dan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Akses menuju Desa Grinting terbilang mudah, karena jalan yang luas serta tata letak pemukiman yang teratur. Untuk sampai di Desa Grinting, dari jalur pantura masuk ke arah utara, jaraknya kurang dari 1 kilometer. Jalanan di desa yang luasnya 1.300 hektare itu sebagian besar sudah beraspal termasuk area persawahan maupun tambak. Sebagai salah satu desa pesisir di Kabupaten Brebes tak heran jika banyak hutan mangrove yang tumbuh secara alami di Desa Grinting dengan luas 45,00 (Ha). Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Brebes Desa Grinting ingin memanfaatkan hutan mangrove tersebut menjadi tempat rekreasi keluarga yang diperuntukan masyarakat Desa Grinting dan

sekitarnya. Dengan harapan untuk mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat serta memberikan fasilitas untuk rekreasi masyarakat. Kondisi topografis Desa Grinting terdiri dari 100% dataran rendah dari luas wilayah dengan ketinggian wilayah mencapai 200 (M) diatas permukaan laut.

B. Profil Desa Grinting

1. Sejarah Desa Grinting

Gambar 1.2
Gapura Desa Grinting



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2022

Menurut Mbah Wangsa selaku *tetua* (pemimpin) desa Grinting berasal dari kata daun *garing* (kering) yang bisa *dilinting* (digulung), karena banyaknya masyarakat yang menggunakan daun jagung untuk merokok, serta sebagai bahan yang diperdagangkan untuk mencukupi hidup keluarga. Masyarakat Desa Grinting pada saat itu hidup dari pertanian dan perikanan, peradaban kondisi sosial masyarakatnya pun masih sangat *primitive* (sederhana). Jumlah penduduk relatif sedikit, sehingga sangat mempengaruhi cara berfikir masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai kerukunan dengan segala keterbatasannya. Sedangkan nilai-nilai keyakinan yang berkembang bersifat *animisme* dan *dinamisme* yaitu kepercayaan kepada roh dan

benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib. Mbah Wangsa sebagai seseorang yang dianggap mempunyai banyak kelebihan merupakan penemu sumber mata air pertama yang dikenal dengan sebutan “Sumur Tantu Wetan” yang dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Walaupun sumur tersebut hanya terbuat dari tumpukan kayu sebagai penahan guguran tanah. Namun, atas kehendak Allah Swt sumur itu tidak pernah kering walau musim kemarau sekalipun.

Sepeninggalan Mbah Wangsa *tetua* desa diteruskan oleh anak laki-laki nya yaitu Karta (Sukma Jati). Pada masa Desa Grinting yang dipimpin oleh Sukma Jati terdapat perbaikan dalam hal infrastruktur seperti pembuatan irigasi dan penataan jalan yang menjadi akses penting dalam sebuah daerah. Kondisi masyarakat sudah mengalami peningkatan dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul kemudian dimanfaatkan oleh Sukma Jati sebagai ajang silaturahmi dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau problem di Desa Grinting. Sukma Jati adalah sosok pemimpin yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Bahkan semasa hidupnya Sukma Jati gemar menolong dan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga arti nama Sukma Jati adalah mempunyai jiwa yang teguh. Sukma Jati menikah dengan gadis yang bernama Nyai Sadimen, kemudian mempunyai anak yang bernama Jaka Wegig, lalu merantau ke Jawa Barat mendirikan sanggar keislaman. Perluasan wilayah Desa Grinting yang disebabkan oleh proses alam dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan masyarakat sehari-hari.

Sepeninggalan Sukma Jati, dilihat dari kondisi makro politik pemerintahan sedang terjadi konflik internal antara Prabu Siliwangi dengan Kesepuhan Cirebon, baik berupa konflik kewilayahan maupun keagamaan. Konflik ini berdampak pada wilayah sekitarnya termasuk Desa Grinting karena pada masa ini pemerintahan Brebes belum terbentuk. Pada masa ini, datanglah seorang pengembara yang bernama Suryaningrat dari wilayah Cirebon dengan rombongan memasuki wilayah Grinting bermaksud untuk menghindari konflik internal di keraton. Rombongan yang mengiringi Suryaningrat yaitu istrinya yang bernama Wulan Sari, penghulu keraton (Kyai Teja), adiknya yang bernama Tunggul. Dalam perkembangannya, Suryaningrat akhirnya diangkat menjadi *tetua* Desa Grinting karena mampu mengenalkan ajaran

Islam dengan sikap dan perilaku yang santun kepada masyarakat. Masa kepemimpinan Suryaningrat pertanian dan perdagangan di Desa Grinting maju dengan pesat. Bahkan pernah dibangun sebuah dermaga yang bernama 'Tuk Malaya'. Dari sinilah nama Grinting mulai dikenal sampai ke daerah lainnya, sehingga perekonomian desa semakin ramai.

2. Struktur Pemerintahan Desa Grinting

Desa Grinting memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, staf pelayanan umum dan kepala dusun. Desa Grinting terdiri dari 5 wilayah/RW dan 37 RT. Sejak awal berdiri Desa Grinting telah dipimpin sebanyak 15 kepala desa yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.10
Nama Kepala Desa dan Periode Jabatan

No.	Nama Kepala Desa	Periode Jabatan
1.	Suradimulya	1994 – 1951
2.	H. Ambari	1951 – 1956
3.	Surasedana	1956 – 1961
4.	Abdul Somad	1961 – 1966
5.	H. Ikhsan	1966 – 1971
6.	H. Kaprawi	1971 – 1976
7.	Rawuh Miharja	1976 – 1981
8.	Supardi	1981 – 1986
9.	D.Sudrajat	1986 – 1991
10.	H.Maulani	1991 – 1996
11.	Sumardi Abu Su'ud	1996 – 2001
12.	Abdurrosid	2001 – 2006
13.	H.Fatduri	2006 – 2011
14.	Roni	2011 – 2021
15.	Suhartono, SH.,MH	2021 – Sekarang

Sumber :SID PRODESKEL 2021

Sementara untuk jabatan dan pembagian tugas pemerintahan Desa Grinting yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.11
Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Grinting

No.	Nama	Jabatan
1.	Suhartono, SH,.MH	Kepala Desa
2.	Trima	Sekretaris Desa
3.	Suwandi Ratum	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Kusnadi Al-Bayhaqi	Kepala Urusan Keuangan
5.	Suwandi, S.IP	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Agus Kasil .S	Kepala Urusan Pemerintahan
7.	Jumadi	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
8.	Fatkhuri	Kepala Seksi Pelayanan
9.	Kisnodo	Staf Pelayanan Umum
10.	Muhammad Ali Rojikin	Kepala Dusun 1
11.	Saeful Anwar, SH	Kepala Dusun 2
12.	Suwarno, SH	Kepala Dusun 3
13.	Diun Prawira, S.Si	Kepala Dusun 4
14.	Ahmad Mulyani, SA	Kepala Dusun 5

Sumber : SID PRODESKEL 2021

Adapun tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat Desa Grinting dalam RPJM Desa Grinting tahun 2021-2027 yaitu sebagai berikut :

a) Kepala Desa

Memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, menetapkan segala peraturan yang terdapat di desa serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b) Sekretaris Desa

Memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan. Seperti, melaksanakan urusan ketatausahaan dan penataan administrasi perangkat desa.

c) Kepala Dusun

Memiliki tugas untuk membina ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Grinting. Serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d) Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan bidang tugasnya yaitu :

- a) Bidang Tata Usaha : Melaksanakan tugas pada bagian tata usaha yang berkaitan dengan proses pelayanan kepada masyarakat. Tugas diantaranya adalah surat menyurat, penyediaan sarana dan prasarana untuk rapat, menjaga aset inventaris Desa Grinting.
- b) Bidang Keuangan : melaksanakan tugas pada bagian keuangan desa. Membuat laporan keuangan baik pendapatan ataupun pengeluaran. Mengelola sumber-sumber pendapatan untuk kemudian dianggarkan kembali untuk kepentingan atau kebutuhan pembangunan Desa Grinting.
- c) Bidang Perencanaan : Melaksanakan tugas pada bagian pembuatan rencana-rencana pembangunan desa yang dikelola sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Tidak hanya itu, tugas kepala urusan bagian perencanaan juga harus melakukan pengawasan dan mengevaluasi proses pembangunan Desa Grinting.

e) Kepala Seksi (Kasi)

Memiliki tugas untuk mengontrol pelaksanaan dan pembinaan tata tertib administrasi desa, melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan serta melaksanakan penyuluhan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

f) Staf Pelayanan Umum

Memiliki tugas untuk menyimpan, memelihara dan menemukan kembali arsip-arsip kantor, memelihara inventaris desa, mempersiapkan sarana rapat atau pertemuan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

C. Profil BUMDes Grinting

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Gambar 1.3
Logo BUMDes Grinting



Sumber : Profil BUMDes Grinting 2021

Pengorganisasian yang dapat menggerak perekonomian di pedesaan masih banyak kendala yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha yang dapat mendukung organisasi ini agar bisa mengembangkan program-program pemberdayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan daya kepada masyarakat yang belum terberdayakan dalam mengakses pengetahuan dan pelayanan. Sehingga kedepannya organisasi ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam hal ini BUMDes pada dasarnya merupakan lembaga atau organisasi yang berkonsolidasi terhadap penguatan ekonomi desa. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi desa yaitu : pengembangan keterampilan yang menjadi potensi dari masyarakat. Sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, memberikan wadah kepada UMKM untuk memperluas jaringan pendistribusian barang atau produk lokal masyarakat. Selalu mengedepankan kreatifitas dan inovasi terhadap program-program yang dihasilkan supaya dapat bersaing dengan yang lainnya. Mengembangkan kelembagaan perekonomian desa agar dapat menghasilkan laporan atau data yang akuntabel. Meningkatkan proses manajemen dan teknologi agar dapat selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pada tanggal 26 September 2016 Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes dan diberi nama 'MONCER' yang artinya 'bersinar'. Dengan dasar hukum

PERDES No. 05 tahun 2016. Didirikannya BUMDes MONCER tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Grinting, karena bukan lagi program *topdown* atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga. Potensi ekonomi Desa Grinting adalah pertanian, perdagangan, perikanan dan pariwisata hutan mangrove.

Tabel 1.12
Susunan Kepengurusan BUMDes Grinting

Pembina	:	Suhartono, SH.MH
Dewan Pengawas	:	Ketua : H. Abdul Rozak Anggota : Rajin Wirajaya, SH Anggota : Sudarjo, S.Pd
Pelaksana Operational	:	Direktur : Dadi Fakur, SP Sekretaris : Khalimi, S.Kom Bendahara : Sri Sumanti, S.Pd
Kepala Unit Pengelolaan Sampah		Sutambi
Kepala Unit Pengelola Pasar		Casito Dewa
Kepala Unit Lumbung Pangan	:	Suwiryo
Kepala Unit Kel. Perempuan	:	Ajeng Kartini
Kepala Unit Badan Kredit Desa	:	Anton Wardoyo, SE
Kepala Unit Kesamsatan	:	Eko Purwanto
Kepala Unit Kios Pupuk Lengkap	:	Septino Restu

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021

BUMDes Grinting memiliki visi dan misi yang telah disepakati bersama melalui musyawarah dengan melibatkan peran aktif masyarakat guna mewujudkan desa mandiri untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara menggali dan memberdayakan potensi desa. Visi dan misi BUMDes Grinting diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dengan memberikan solusi melalui pelayanan disetiap unit usaha. Visi misi BUMDes Grinting yaitu sebagai berikut :

VISI

“Mewujudkan Desa Maju Berdikari”

MISI

- a) Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat Desa Grinting dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang.
- b) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Desa Grinting untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Grinting.
- c) Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Grinting.
- d) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dari berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Grinting.

2. Permodalan BUMDes

Tabel 1.13
Permodalan BUMDes Grinting

No	TAHUN	DANA DESA (DD)	BANGUB	TOTAL
1.	2017	Rp. 200.000.000,-	-	Rp. 200.000.000,-
2.	2018	-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
3.	2019	Rp. 70.000.000,-	-	Rp. 70.000.000,-
4.	2020	-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
5.	2021	-	-	-
JUMLAH				Rp. 310.000.000,-

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2020

Pada sistem permodalan BUMDes Grinting bekerja sama dengan pemerintah desa melalui dana desa sebesar 200.000.000 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi modal pertama BUMDes Grinting. Dari modal tersebut kemudian disalurkan untuk mengembangkan unit usaha dari yang hanya empat unit usaha sekarang sudah berkembang menjadi tujuh unit usaha dalam BUMDes. Bahkan BUMDes Grinting akan membuat dua unit usaha baru yaitu usaha perdagangan air minum dan usaha

agrowisata. Strategi pemasaran pada usaha perdagangan air minum akan melibatkan pedagang/pengecer air yang sudah ada. Proses penjualan per unit tangki dan akan diecer oleh pedagang ke masyarakat umum. Sementara pada unit usaha agrowisata masih dalam proses pembangunan yang akan terwujud buka operasional pada tahun 2028 hal ini dikarenakan usaha agrowisata mempunyai kegiatan inti mewujudkan kebun buah mangga sehingga membutuhkan proses waktu yang relatif lama yaitu 7 tahun.

3. Inventaris BUMDes Grinting

Tabel 1.14

Inventaris BUMDes Grinting

NO	JENIS INVENTARIS	UNIT	HARGA	KONDISI
1.	Kendaraan Roda 3	5 Unit	84.000.000,-	4 Baik 2 Rusak
2.	Laptop Asus	1 Unit	4.500.000	Baik
3.	Printer Canon	1 Unit	650.000,-	Baik
4.	Almari Arsip	1 Unit	270.000,-	Baik
5.	Meja Kantor	9 Unit	7.750.000,-	Baik
6.	Meja Badan Pengawas	1 Unt	900.000,-	Baik
7.	Papan Nama Bumdes	1 Unit	1.030.000	Baik
8.	Papan Struktur Bumdes	1 Unit	300.000,-	Baik
9.	Papan Visi dan Misi	1 Unit	300.000,-	Baik
10.	Papan Unit Usaha	3 Unit	450.000,-	Baik
11.	Sanyo	1 Unit	450.000,-	Baik
12.	ATK (Alat Tulis Kantor)	1 Ls	1.000.000,-	Baik

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021

Pada tabel inventaris BUMDes Grinting memiliki 12 jenis inventaris mulai dari kendaraan, benda elektronik hingga ATK (Alat Tulis Kantor). Inventaris paling banyak yang dimiliki BUMDes Grinting adalah meja kantor yaitu sebanyak 9 unit dengan harga Rp. 7.750.000,-. Sedangkan inventaris paling mahal yang dimiliki BUMDes Grinting adalah kendaraan roda 3 dengan harga Rp. 84.000.000,- sebanyak 6 buah dengan kondisi 4 baik, 2 rusak. Alat-alat tersebut tentunya digunakan untuk

mempermudah proses pelayanan pada setiap unit usaha. Seperti kendaraan roda 3 digunakan pada unit usaha pengelolaan sampah untuk mengangkut sampah setiap hari di wilayah Desa Grinting. Serta laptop untuk mempermudah karyawan BUMDes Grinting dalam pembuatan laporan baik laporan harian ataupun laporan bulanan.

BAB IV
PROSES PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BUMDES DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Pada BUMDes Grinting

Gambar 1.4

Rapat Bersama Pengurus BUMDes Grinting



Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2021

BUMDes Grinting merupakan program kegiatan pemberdayaan melalui unit usaha yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. BUMDes Grinting memiliki tujuh unit usaha yang masing-masing usaha dikelola oleh kepala unit usaha yang bertanggung jawab atas berjalannya proses usaha tersebut. BUMDes Grinting menjalankan program kegiatan secara sederhana namun terstruktur dengan memberikan pelayanan umum (*Public Service*) kepada masyarakat. Program kegiatan pemberdayaan BUMDes Grinting adalah pemanfaatan sumber daya lokal yang memanfaatkan teknologi tepat guna, pemberdayaan usaha perempuan, pendistribusian barang dan jasa, serta bisnis keuangan atau simpan pinjam. Orientasi program pemberdayaan didasari oleh kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaanya dapat bermanfaat sekaligus dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat. Berikut tujuh unit usaha beserta kegiatan usaha yang menghasilkan atau dihasilkan yaitu :

Tabel 1.20
Kegiatan Usaha BUMDes Grinting

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
Unit Usaha Pengelolaan Sampah	Mengelola sampah dari masyarakat dengan iuran bulanan.
Unit Usaha Pasar Desa	Mengelola pasar desa dengan tiketing.
Unit Usaha Lumbung Pangan	Mengelola lumbung pangan dengan sistem pinjaman padi/gabah dalam bentuk rupiah atau pinjaman padi.
Unit Usaha Kelompok Perempuan	Mengelola simpan pinjam produktif usaha masyarakat dengan jaminan serta produksi makanan khas Desa Grinting.
Unit Usaha Badan Kredit Desa (BKD)	Mengelola pinjaman usaha kecil di dalam pasar desa dengan sistem mingguan.
Unit Usaha Kesamsatan	Mengelola jasa pengurusan pajak kendaraan bermotor.
Unit Kios Pupuk Lengkap	Mendistribusikan pupuk subsidi.

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa BUMDes Grinting memiliki tujuh unit usaha, setiap unit usaha mempunyai tugas dan fungsi masing-masing mulai dari jasa, pemberdayaan perempuan hingga pendistribusian pupuk subsidi. Sehingga keberadaan BUMDes tentu saja sangat membantu masyarakat Desa Grinting terutama dalam mengakses pelayanan. Dari unit usaha tersebut masing-masing dikelola oleh kepala unit usaha yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pemberdayaan. Setiap satu bulan sekali diberlakukan sistem setor yang dihasilkan dari setiap unit usaha kepada bendahara BUMDes yang nantinya akan dikumpulkan untuk perputaran uang dan untuk mengembangkan unit usaha. Melalui wawancara dengan Bapak Dadi Fakur, S.P selaku direktur BUMDes Grinting beliau mengatakan bahwa :

“Keberadaan BUMDes tentu saja sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, karena masih banyak sarana dan prasarana yang sulit diakses oleh masyarakat, bisa jadi karena ketidaktahuan

masyarakat ataupun jauhnya jangkauan pemerintah. Contohnya pendistribusian pupuk, dikecamatan bulakamba baru ada beberapa desa yang menyalurkan pendistribusian pupuk. Padahal Kabupaten Brebes mayoritas pekerjaan sebagai petani, inikan sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan. Sehingga melalui unit usaha dalam BUMDes diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat Desa Grinting”. (Wawancara dengan Bapak Dadi Fakur, 9 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan BUMDes Grinting tidak hanya sebatas pada aspek perekonomian melainkan berbasis pada pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa yang berlandaskan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial didapat dari musyawarah bersama masyarakat dan pengurus BUMDes dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Cara ini efektif dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui unit usaha. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Watimi selaku pelanggan unit usaha pengelolaan sampah :

“Jadi waktu itu kami sebagai perwakilan masyarakat diundang untuk membahas masalah sampah, karena sebelum adanya unit pengelolaan sampah masyarakat biasanya mengelola sampah itu dibakar atau di buang ke area persawahan. Selain merusak lingkungan juga menimbulkan pemandangan yang kurang indah serta bau yang tidak sedap. Akhirnya disepakati pengadaan unit pengelolaan sampah yang iurannya setiap satu bulan sekali, kalo sekarang Rp. 15.000 /perbulan”. (Wawancara dengan Ibu Watimi, 25 April 2022)

Gambar 1.5

MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)



Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2021

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pentingnya kerja sama antara pengurus BUMDes dengan masyarakat melalui musyawarah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibangun BUMDes Grinting sehingga dapat tepat sasaran membantu masyarakat. Seperti contoh penentuan harga yang sudah disebutkan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun proses pengelolaan pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Grinting melalui unit usaha yaitu sebagai berikut :

1. Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Merupakan usaha pengambilan sampah dari rumah tangga masyarakat desa, kemudian dikumpulkan pada suatu lokasi dan dipilah/dikelola untuk mendapatkan keuntungan finansial. Saat ini unit pengelolaan sampah mempunyai pelanggan sebanyak 9.021 rumah tangga dengan kontribusi retribusi sebesar Rp. 15.000,- per bulan. Pengambilan sampah dilakukan oleh petugas sampah yang keliling setiap hari dengan pembagian tugas wilayah masing-masing. Kemudian sampah tersebut dikumpulkan ke tempat pengolahan atau daur ulang sampah, letaknya di area pekarangan yang jauh dari pemukiman warga Desa Grinting. Unit pengelolaan sampah memiliki fasilitas armada angkut berupa kendaraan roda 3 (tiga) yaitu : 4 buah Tossa (kondisi baik/operasional) dan 2 buah Tossa (kondisi rusak berat), 1 buah gedung/bangunan ukuran 6 X 12 meter yang digunakan untuk pendaur ulang sampah. Nilai investasi sebesar Rp. 140.264.000,-. Jumlah pendapatan periode 2017-2020, sebesar Rp. 156.798.000,- (Khalimi, 2020).

2. Unit Usaha Pasar Desa

Merupakan jenis usaha jasa untuk mempertemukan pedagang dan pembeli produk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Tanah dan bangunan adalah aset milik desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes Grinting untuk mendapatkan manfaat optimal. Desa Grinting memiliki dua pasar yang letaknya di ujung dan tengah pedesaan, karena luasnya wilayah sehingga keberadaan pasar harus dibagi dua wilayah. Agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Tidak hanya itu, unit usaha pasar juga menugaskan Linmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena kedua pasar tersebut berada di tengah pemukiman warga sehingga ketika pagi ramai hingga menimbulkan kemacetan. Saat ini, unit

pasar desa mempunyai fasilitas antara lain : tanah dan bangunan pasar desa seluas 750 M2, Nilai investasi sebesar Rp. 250.000.000,-. Jumlah pendapatan periode 2017-2020, sebesar Rp.101.930.000,-. (Khalimi, 2020).

3. Unit Usaha Lumbung Pangan

Merupakan jenis usaha simpan pinjam petani berupa gabah/modal usaha pertanian, dengan siklus usaha musiman (2 musim/tahun). Mayoritas masyarakat Desa Grinting bermatapencaharian sebagai petani sehingga keberadaan unit usaha lumbung pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya usaha lumbung pangan masyarakat dapat meminjam gabah/modal usaha pertanian yang kemudian dikembalikan saat musim panen bisa berupa uang ataupun gabah/padi. Sehingga pada usaha ini hanya berlaku untuk para petani, karena pada musim pancaroba biasanya para petani kesulitan untuk mencari pinjaman disaat belum datangnya musim panen. Saat ini, unit lumbung pangan mempunyai fasilitas antara lain : bangunan gudang penyimpanan gabah/padi uk. 8 X 14 meter, kapasitas 60 ton gabah/padi. Nilai investasi modal sebesar Rp. 90.000.000. Pendapatan pada periode tahun 2017-2020 sebesar Rp. 84.850.000,- (Khalimi, 2020).

4. Unit Kelompok Perempuan

Gambar 1.6
Pameran UMKM Grinting Food



Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2021

Merupakan jenis usaha yang memberdayakan kaum perempuan untuk mengasah kreatifitas dalam mengelola makanan khas Desa Grinting untuk dijadikan oleh-oleh. Pengembangan UMKM Grinting Food sudah menghasilkan beberapa produk olahan makanan yang berbahan daun kelor, ikan bandeng dan telur asin yaitu sebagai berikut :

- Keripik Daun Kelor
- Kerupuk Daun Kelor
- Bolu Daun Kelor
- The Rempah Kelor Instan
- Bandeng Presto
- Nugget Bandeng
- Abon Bandeng
- Sambel Bandeng
- Keripik Telor Asin

Produk-produk ini sudah didistribusikan ke berbagai tempat seperti rest area, bandara, dan toko oleh-oleh lainnya. Omset penjualan produk-produk UMKM ini sempat menurun akibat pandemi covid-19 akibat kebijakan pembatasan mobilitas sosial. Sehingga para pelaku UMKM sempat beralih ke media online sebagai sarana promosi produk. Melalui media online salah satunya media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram* yang sudah diikuti oleh ribuan anggota diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM sebagai sarana promosi sehingga dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19. Walaupun saat ini kebijakan pembatasan sosial sudah mulai kembali normal. Pendapatan pada periode 2017-2020 sebesar Rp. 49.100.000,-, (Khalimi, 2020).

5. Unit Badan Kredit Desa

Merupakan jenis usaha jasa keuangan, yang diperuntukan bagi pelaku usaha kecil/menengah ditingkat desa. Unit BKD (Badan Kredit Desa) dikelola dengan sistem setor setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis di kantor BUMDes Grinting. Besaran setoran sesuai dengan besaran pinjaman yaitu maksimal pinjaman atau limit tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-. Memiliki 40 pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menjadi anggota unit BKD. Adapun syarat yang diharuskan

jika masyarakat ingin meminjam uang ke BKD yaitu memiliki usaha kecil atau UMKM dan tidak sedang memiliki perkreditan lain seperti bank, angsuran kendaraan selain di BKD. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tunggakan setoran yang *double* akibat pinjaman ke lembaga lain. Saat ini unit BKD mempunyai fasilitas, antara lain : modal usaha sebesar Rp. 153.700.000,-. Memperoleh pendapatan periode 2017-2020 sebesar Rp. 38.778.000,- (Khalimi, 2020).

6. Unit Usaha Kesamsatan

Merupakan jenis usaha jasa kesamsatan (pajak kendaraan bermotor) adalah jalinan kerjasama antara BUMDes Grinting dengan kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes. Dengan adanya unit kesamsatan masyarakat tidak lagi mengantri untuk membayar pajak. Sistem pengelolaannya masyarakat bisa langsung datang ke kantor BUMDes Grinting yang letaknya di Balai Desa Grinting kemudian menunjukkan surat-surat pajak kepada petugas. Jika surat-surat kendaraan lengkap seperti STNK, BPKB, dan KTP asli maka biaya oprasional jasanya hanya sebesar Rp. 40.000,- namun, apabila surat-surat kendaraan tersebut tidak lengkap maka akan ada biaya tambahan seperti jika tidak ada KTP asli sebesar Rp. 90.000,-. Memiliki pelanggan kurang lebih 150 setiap bulan, karena unit usaha kesamsatan bentuknya jasa sehingga keanggotaanya tidak tetap. Saat ini unit kesamsatan belum mempunyai fasilitas, sehingga nilai investasi Rp. 0,-. Pada periode tahun 2017-2020 ini memperoleh pendapatan sebesar Rp. 104.059.000,- (Khalimi, 2020).

7. Unit Usaha Kios Pupuk Lengkap

Merupakan jenis usaha perdagangan saprodi pertanian berupa penjualan pupuk subsidi kepada petani dengan menggunakan kartu tani. Sehingga proses pengelolaannya tidak seperti jual beli toko pada umumnya. Jadi syarat pendistribusian pupuk, masyarakat wajib menggunakan kartu tani yang sudah dibuat dan dibagikan oleh pemerintah sesuai dengan luas sawah milik petani. Sehingga apabila petani mempunyai lahan persawahan yang luas maka jatah pupuk yang dapat didistribusikan juga banyak sesuai luas persawahan. Apabila luas sawah milik petani sedikit maka jatahnya pun akan sedikit. Unit usaha pupuk kios lengkap sangat membantu masyarakat karena pupuk yang sudah disubsidi pemerintah

harganya jauh lebih murah dengan kurang lebih selilih harga dengan toko sebsesar Rp. 50.000,- /perkantong. Sedangkan kebutuhan pupuk untuk para petani tidak satu atau dua kantong tapi lebih dari itu sehingga sangat membantu para petani. Adapun rincian harga dan jenis pupuk subsidi yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.21
Jenis dan Harga Pupuk Pada Unit Usaha Pupuk Subsidi

Jenis Pupuk	Urea	ZA	SP 32/TS	Phonska
Harga /Kantong	120.000	115.000	135.000	135.000

Sumber : Laporan Unit PKL 2020.

Saat ini unit usaha Kios Pupupk Lengkap, mempunyai fasilitas : gudang ukuran 4 X 14 meter, kapasitas 30 ton Sarpras lengkap kios berupa (pallet, timbangan elektrik, sorongan). Nilai modal investasi sebesar Rp. 85.179.000,-. Pada periode tahun 2017-2020, memperoleh pendapatan sebesar Rp. 37.655.000-, (Khalimi, 2020).

Adapun aturan bagi hasil atau rugi dan kerjasama BUMDes Grinting yaitu sebagai berikut :

- a) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- b) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar dua desa/lebih dengan pihak ketiga.
- c) Kerjasama usaha antar dua desa/lebih dilakukan dalam satu kecamatan/antar kecamatan dalam satu kabupaten dan harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.
- d) Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama dan memuat : subyek dan obyek kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa dan pengalihan.
- e) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar dua desa/lebih antar kecamatan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari sejak ditandatangani dan disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 hari sejak ditandatangani (Khalimi, 2020).

Semua laporan yang direkap setiap hari sampai setiap bulan akan dipresentasikan pada Musyawarah Desa di akhir tahun dengan format laporan

pertanggungjawaban. Dengan cara pelaksana operasional/direksi melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Kemudian kepala desa akan melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum Musdes (Musyawarah Desa). Dalam proses pengelolaan BUMDes juga melibatkan pembina dan pengawas untuk berjalannya suatu program pemberdayaan. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari kementerian dalam negeri, gubernur/pemerintah provinsi, bupati/pemerintah kabupaten, camat dan kepala desa. Sementara untuk pengawasan BUMDes Grinting dilakukan oleh BPD/pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa dan inspektorat kabupaten.

B. Faktor Pendorong Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting

Meningkatnya pendapatan BUMDes Grinting setiap tahun melalui unit usaha, kemudian berkembangnya proses pemberdayaan tidak luput dari faktor-faktor pendukung. Keberhasilan ini dicapai untuk melaksanakan visi dan misi BUMDes Grinting salah satunya adalah menyejahterakan masyarakat. Melalui wawancara kepada Bapak Dadi Fakur, S.P selaku direktur BUMDes beliau menjelaskan faktor-faktor pendukung BUMDes Grinting yaitu sebagai berikut :

“Faktor pendukung keberhasilan BUMDes hingga memiliki pendapatan yang naik setiap tahunnya itu karena peran aktif masyarakat, tanpa adanya peran dari masyarakat BUMDes Grinting hanya menjadi program tanpa peserta. Mungkin juga karena desa grinting memiliki wilayah yang cukup luas dengan penduduk yang cukup padat jadi sistem perekonomiannya melaju dengan pesat. Sehingga kebutuhan masyarakat atas program pelayanan dan pemberdayaan akan selalu ada dan bertambah. Serta yang paling penting adalah pemerintah desa yang responsive terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Grinting”. (Wawancara dengan Bapak Dadi Fakur, 9 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan beberapa poin faktor-faktor pendukung BUMDes Grinting yaitu sebagai berikut :

1. Bonus Demografis

Wilayah Desa Grinting yang cukup luas dengan penduduk yang padat menjadi faktor pendukung BUMDes Grinting dalam merealisasikan program pemberdayaan melalui unit usaha. Contoh pada pengadaan unit usaha kios pupuk lengkap, BUMDes Grinting mencoba untuk memenuhi kebutuhan para petani dengan memberikan akses pendistribusian pupuk subsidi yang harganya jauh lebih murah. Hal ini dilakukan

karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Grinting sebagai petani. Sehingga unit pengadaan pupuk subsidi sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Desa Grinting.

2. Siklus Ekonomi Desa Yang Dinamis

Dengan padatnya penduduk maka akan berpengaruh terhadap laju perekonomian masyarakat. Sehingga siklus ekonomi yang dinamis menjadi faktor pendukung BUMDes Grinting dalam menjalankan program pemberdayaan. Hal ini dikarenakan padatnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada banyaknya kebutuhan masyarakat terutama pada bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Grinting mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui program-program pada unit usaha BUMDes. Untuk membantu dan memberikan akses kepada masyarakat Desa Grinting.

3. Pemerintah Desa Yang Responsif

Berhasilnya BUMDes dalam proses pengelolaan pemberdayaan tidak luput dari peran pemerintah desa yang responsif peka terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui musyawarah dengan berbagai lapisan masyarakat, kemudian pemerintah desa menentukan pokok yang jadi permasalahan, lalu dibuat rancangan program BUMDes, setelah itu pelaksanaan dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga program BUMDes bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun desa yang berdikari sesuai dengan visi misi BUMDes Grinting.

C. Faktor Penghambat Dalam Proses Pengelolaan BUMDes Grinting

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Grinting melalui unit usaha tidaklah berjalan mulus dan lancar pasti ada kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh direktur BUMDes Grinting yaitu Bapak Dadi Fakur, melalui wawancara beliau menjelaskan:

“Hambatan atau kendala tentu saja ada yah mbak, setiap proses pemberdayaan pasti tidak luput dari hambatan atau kendala. Semua unit usaha pasti ada kendalanya masing-masing. Tapi pada umumnya itu yang pertama modal terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak ada habisnya itu menjadi salah satu tantangan terbesar, pengurus BUMDes

harus pinter-pinter mengelola keuangan supaya uangnya bisa muter dan bisa membangun unit usaha yang lebih baik”.

“Kedua SDM terbatas, SDM dalam hal ini bukan masyarakat secara keseluruhan tapi karyawan BUMDes yang mampu membangun, mengelola serta siap menerima honor yang tidak stabil seperti di pabrik. Karena sistem honor pegawai BUMDes itu persenan mbak jadi tergantung pada pendapatan setiap unit usaha. BUMDes belum mampu untuk memberikan honor stabil karena pendapatan itu untuk modal lagi mbak. Hal ini juga menjadi tugas BUMDes kedepan supaya mampu memberikan honor stabil kepada pegawainya”.

“Ketiga, ketidaktahuan masyarakat tentang adanya unit usaha dalam BUMDes Grinting. Seperti pada unit kesamsatan, lumbung pangan dan BKD (Badan Kredit Desa). Itu biasanya kami lakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Desa Grinting”. (Wawancara dengan Bapak Dadi Fakur, 9 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, permodalan menjadi hambatan atau kendala terbesar bagi berdirinya BUMDes, kemudian SDM yang mampu mengelola dan siap mengabdikan untuk masyarakat juga terbatas. Hal ini wajar adanya karena setiap orang pasti ingin bekerja di tempat yang mampu memberikan honor yang stabil sehingga tidak heran butuh orang-orang yang benar-benar tulus ingin membangun desa melalui BUMDes. Akan tetapi hal ini bukan berarti keberadaan BUMDes tidak berpengaruh bagi masyarakat atau pegawainya karena hal semacam ini umum terjadi. Bahwa untuk membangun suatu instansi harus mempunyai tekad dan dedikasi yang tinggi. Tidak hanya itu pegawai BUMDes juga dilatih bagaimana membangun usaha dari bawah, karena masyarakat dan pegawai BUMDes juga yang nanti akan menikmati hasilnya. Seperti yang dijelaskan Bapak Dadi Fakur bahwa akan ada rencana BUMDes memberikan honor stabil setiap bulan kepada para pegawainya. Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada kepala unit pengelolaan sampah yaitu Bapak Sutambi untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dilapangan terkait dengan proses pengelolaan BUMDes.

“Kalo kendala terkait dengan unit usaha pengelolaan sampah sebenarnya lebih ke pengadaan kendaraan untuk mengangkut sampah mbak, jadi ini kan masih pake Tossa sedangkan wilayah desa grinting cukup luas sehingga sampah yang harus diangkut setiap harinya itu banyak banget mbak, kalo pake Tossa tidak cukup harus bolak balik angkut. Apalagi kalo lagi musim hajatan itu satu Tossa hanya untuk mengangkut sampah hajatan aja mbak. Tapi saya inisiatif sendiri sih mbak jadi belakang Tossa itu saya kasih gerobak untuk menambah muatan sampah”. (Wawancara dengan Bapak Sutambi, 14 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengadaan kendaraan untuk mengangkut sampah masih kurang. Hal ini juga nantinya akan menjadi tugas BUMDes Grinting untuk menambah armada kendaraan pengangkut sampah. Kemudian Bapak Sutambi juga menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat atas kebersihan masih kurang karena masih ada masyarakat yang membuang sampah di area persawahan karena tidak ingin membayar iuran sampah setiap bulannya. Hal ini juga menjadi tugas unit pengelolaan sampah untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Kisnodo selaku kepala unit usaha pengelolaan pasar yaitu sebagai berikut :

“Kendala pada unit usaha pasar itu keterbatasan lahan mbak, jadi kedua pasar desa grinting memiliki lahan yang sempit jadi pedagang agak kesulitan menaruh dagangannya. Tapi itu sudah saya ajukan ke pihak BUMDes agar bisa ditata kembali. Apalagi kalo dipasar tengah itu bahkan menyebabkan kemacetan karena letaknya dipinggir jalan”. (Wawancara dengan Bapak Kisnodo, 15 Mei 2022)

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan oleh Bapak Restu Septino selaku kepala unit pupuk kios lengkap beliau menjelaskan bahwa :

“Kalo di unit usaha pupuk kendalanya persediaan jatah kartu tani sama stok pupuk subsidi yang ada dipusat, mungkin karna pupuk subsidi jadi agak lama proses pengirimannya. Kemudian setiap petani itu kan punya jatah pupuk subsidi kadang petani mintanya lebih dari jatah. Kadang masyarakat yang tidak punya kartu tani juga ingin membeli pupuk subsidi. Tapi kan itu tidak boleh harus sesuai prosedur untuk meminimalisir perdagangan pupuk subsidi di tengah masyarakat”. (Wawancara dengan Bapak Restu Septino, 15 Mei 2022)

Dari hasil wawancara kepada narasumber terkait faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan BUMDes Grinting dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan modal

Permodalan menjadi hambatan utama dalam proses pengelolaan BUMDes Grinting, hal ini dikarenakan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apalagi kegiatan tersebut menyangkut pemberian fasilitas, pemberian akses, dan pemberian daya kepada masyarakat, sudah pasti harus ada modal yang harus dianggarkan. Permodalan tersebut pun tidak serta merta mudah didapatkan oleh BUMDes Grinting, ada prosedur

yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Setelah mendapatkan modal usaha, tugas BUMDes adalah mengembangkan modal tersebut untuk kebermanfaatan masyarakat Desa Grinting. Seperti yang sudah diketahui, saat ini BUMDes Grinting telah mempunyai beberapa aset dan inventaris sebagai penunjang atau sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

2. Keterbatasan SDM

Maksud dari keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) disini adalah bukan masyarakat secara keseluruhan akan tetapi SDM yang yang mampu mengabdikan bersama membangun, mengolah dan mengembangkan BUMDes Grinting. Seperti yang diketahui bahwa saat ini BUMDes Grinting belum mampu memberikan honor stabil kepada para pegawainya, hal ini dikarenakan pendapatan BUMDes itu akan dibagi-bagi kembali untuk perputaran modal. Jadi sistem honor dalam BUMDes menganut sistem persenan, maksud dari hal ini adalah tergantung pada pendapatan disetiap unit usaha. Apabila setiap unit usaha mendapatkan omset tinggi, maka akan berpengaruh juga pada penghasilan pegawai BUMDes tersebut. Dari hal ini dapat dipelajari bahwa untuk membangun suatu instansi harus mempunyai tekad dan dedikasi yang tinggi. Maka diperlukan SDM yang mempunyai tekad kuat dan berdedikasi tinggi, sehingga tak heran jika SDM yang seperti ini sulit dicari.

3. Sikap dan perilaku masyarakat

Kebanyakan masyarakat Desa Grinting tidak mengetahui adanya BUMDes yang mempunyai unit-unit usaha didalamnya. Sebernarnya masyarakat ikut serta dalam keanggotaan minimal salah satu unit usaha dalam BUMDes, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa unit usaha tersebut dikelola oleh BUMDes Grinting. Hal ini lah yang menjadi hambatan untuk pengurus BUMDes dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Berbagai sosialisasi pun sudah dilakukan oleh BUMDes Grinting dari mulai *Dor to dor*, sampai mengadakan musyawarah desa yang rutin diadakan setiap satu bulan sekali. Hal ini sebagai upaya BUMDes untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes Grinting.

4. Persaingan jasa/produk sejenis

Persaingan adalah kendala utama yang sering terjadi dalam dunia usaha, sekalipun usaha tersebut dikelola oleh pemerintah desa dalam hal ini BUMDes. Sehingga dibutuhkan kreatifitas, program yang inovatif dan solutif serta kinerja yang maksimal, agar kepercayaan masyarakat tentang pelayanan BUMDes Grinting tetap terjaga. Kendala persaingan yang paling sering terjadi pada unit usaha adalah unit kesamsatan, seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang berprofesi sebagai *Jastip* (Jasa titip) dengan upah yang dipatok beragam sesuai dengan jarak tempuh. Usaha ini biasanya dipromosikan melalui media sosial seperti *Facebook*, *WA* dan sebagainya. Hal ini merupakan tantangan bagi BUMDes Grinting untuk menjaga kualitas kinerja yang maksimal.

Semua unit usaha BUMDes Grinting dalam proses pemberdayaan memiliki faktor pendorong dan faktor kendala masing-masing yang akan penulis rangkum melalui tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.22
Tantangan dan Strategi Unit Usaha

No	Unit Usaha	Potensi	Harapan	Tantangan	Strategi
1.	Pengelolaan Sampah	Produk sampah desa kl. 4.000 kg/hari	- Kondisi desa “Zero Waste” - Menambah Pendapatan finansial	Sikap/ Perilaku masyarakat belum maksimal berubah	- Sosialisai lebih intens - Penambahan Armada angkut - Melengkapi Sarpras Pengolahan
2.	Pasar Desa	Jumlah pedagang dan pembeli yang makin bertambah	- Menampung lebih banyak pedagang	Menambah jumlah los pedagang	Mengajukan anggaran penambahan los pedagang melalui APBDES
3.	Lumbung Pangan	Hasil panen Padi/gabah kl. 1.800 ton/musim/tahun	Dapat menampung hasil panen dari petani	Keterbatasan modal	-Penyertaan Modal Desa -Modal Masyarakat
4.	Unit Kelompok Perempuan	Kreatifitas masyarakat, hasil	-Mempromosikan produk lokal	- Konsistensi masyarakat dalam	- Pendistribusian secara rutin

		bumi dan laut yang melimpah.	- Memberdayakan kaum perempuan	memproduksi makanan - Modal - Persaingan produk	- Penambahan modal - Memperkuat kualitas produk.
5.	Badan Kredit Desa	Kegiatan ekonomi desa yang makin berkembang	Memfasilitasi modal usaha kecil/menengah	-Sikap/prilaku masyarakat -Keterbatasan modal usaha	- Tata aturan yang ketat dan konsekuen -Tertib administrasi
6.	Kesamsatan	Kepemilikan kendaraan bermotor wajib pajak berjumlah lebih dari 5.000 unit	Perpajakan kendaraan bermotor di desa dan sekitarnya agar melalui Bumdesa	Adanya saingan Jasa sejenis oleh masyarakat lain	-Memperbaiki pelayanan
7.	Kios Pupuk Lengkap	Memfasilitasi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan kapasitas lebih dari 200 ton/tahun	Kemudahan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi	Pelayanan wajib menggunakan Kartu Tani	Koordinasi dengan pihak Distributor dan Dinas Pertanian Kabupaten

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan wawancara yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang terjadi dalam proses pemberdayaan di Desa Grinting menjadi fokus atau tugas utama pengurus BUMDes dalam memperbaiki kualitas pelayanan atau pemberdayaan. Sementara faktor pendorong atau pendukung menjadi bonus yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai kebermanfaatan untuk masyarakat Desa Grinting secara luas. Kemudian BUMDes Grinting harus selalu mengedepankan kualitas pemberdaayan dengan cara transparansi laporan keuangan dan kegiatan agar timbul *Trust* atau kepercayaan terhadap masyarakat. dengan demikian tercapai visi dan misi yang menjadi tujuan dari pendirian BUMDes Grinting.

BAB V
DAMPAK KEBERADAAN BUMDES TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN
BREBES

A. Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes.

Pelaksanaan program pemberdayaan tidak terlepas dari sebuah peraturan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan. Suatu peranan dapat diukur dari tingkat keberhasilan. Jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dan sesuai dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Tentu ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal dan terlalu manis untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit dalam merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Kondisi perekonomian masyarakat sebelum adanya BUMDes Grinting bisa dikatakan kurang tertata dengan baik dilihat dari berbagai aspek. Berikut adalah uraian kondisi sebelum dan sesudah adanya BUMDes Grinting.

1. Kondisi Sebelum Adanya BUMDes Grinting

a) Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Sebelum adanya program unit usaha pengelolaan sampah yang dibentuk BUMDes, pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan cara dibakar atau dibuang sembarangan ke area persawahan. Tentu saja hal ini dapat merusak lingkungan apabila tidak segera ditanggulangi, apalagi area persawahan yang seharusnya dijaga keasriannya. Agar dapat menghasilkan panen hasil bumi yang berkualitas. Melalui wawancara dengan Ibu Watimi selaku perwakilan masyarakat sekaligus pelanggan unit usaha pengelolaan sampah. Beliau menjelaskan alasan kenapa masyarakat membuang sampah di area persawahan berikut jawabannya :

“Soalnya area persawahan itu jauh dari pemukiman warga mbak, jadi kalo bisa dilihatkan Desa Grinting itu letaknya pemukiman terus sampe ke utara baru persawahan, jadi bisa diibaratkan area persawahan itu dapurnya desa mbak, makanya pada mbuang disitu. Padahal kan bisa ngrusak lingkungan”. (Wawancara dengan Ibu Watimi, 25 April 2022)

Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebersihan

lingkungan. Disamping itu, kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan.

b) Pengelolaan Pasar Sarat Akan Pungutan Liar

Seperti yang diketahui bahwa pasar menjadi salah satu pusat perekonomian yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Dengan menyewakan lahan/tempat/pangkalan kepada masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Seperti tidak ada fasilitas kebersihan, keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibu Kasnah selaku anggota pedagang unit usaha pengelolaan pasar beliau mengatakan bahwa :

“Jadi sebelum adanya BUMDes yang mengatur pengelolaan pasar, para pedagang itu biasanya nyewa tempat untuk dagang dan biaya sewanya itu dikelola secara mandiri oleh masyarakat sehingga harganya pun beda-beda. Biaya itu pun hanya sebatas penyewaan tempat mbak tidak termasuk biaya kebersihan dan keamanan, makanya sering terjadi kecopetan dan kemacetan karena kan pasarnya ditengah pemukiman warga sehingga terlihat semrawud mba”. (Wawancara dengan Ibu Kasnah, 26 April 2022)

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kasnah sebelum adanya unit usaha pengelolaan pasar, sering terjadi tindak kriminal seperti kecopetan dan kemacetan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas keamanan.

c) Sebatas Pinjaman Uang

Sebelum adanya program peminjaman padi/gabah yang dibuat oleh BUMDes Grinting. Jasa peminjaman hanya sebatas pinjaman uang yang jangka angsurannya adalah harian, mingguan ataupun bulanan. Sedangkan jasa pinjaman dengan model jangka waktu tersebut kurang cocok untuk para petani. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Grinting bermatapencaharian sebagai petani. Sehingga ketika musim panen para petani berlimpah hasil tani namun berbeda saat musim pancaroba tiba masyarakat petani justru kesulitan dalam hal perekonomian. Hal ini dikarenakan para petani tidak bisa mengolah hasil panen. Tentu saja hal ini menarik perhatian pengurus BUMDes untuk memberikan fasilitas peminjaman padi/gabah yang bisa dilunasi saat musim panen. Pelunasan

peminjaman padi/gabah ini bisa berupa uang atau padi, hal ini tentu saja dapat memudahkan masyarakat khususnya petani.

d) Kurangnya Pengetahuan Kaum Perempuan Tentang Berwirausaha

Sebelum adanya unit usaha kelompok perempuan, kegiatan kaum perempuan tidak lepas dari menjadi buruh tani atau ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berwirausaha. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Darmi selaku perwakilan masyarakat dan anggota UMKM dari unit usaha kelompok perempuan beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya unit usaha perempuan kegiatan khususnya kaum perempuan kebanyakan bertani, terus jadi ibu rumah tangga. Ibu-ibu juga biasanya hanya bergantung pada pendapatan suami mba”. (Wawancara dengan Ibu Darmi, 05 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurangnya edukasi tentang berwirausaha menjadikan pergerakan kaum perempuan terbatas dan terkesan hanya bergantung pada laki-laki dari segi kegiatan dan pendapatan. Sedangkan potensi yang dimiliki kaum perempuan sangatlah besar apabila diberdayakan dengan baik.

e) Masyarakat Meminjam Uang ke Rentenir Dengan Bunga Tinggi

Untuk mengetahui kondisi sebelum adanya BUMDes Grinting terkait dengan jasa peminjaman uang penulis melakukan wawancara kepada Ibu Korisah beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya unit BKD (Badan Kredit Desa) masyarakat kalo mau minjem uang itu harus ke bank atau kalo pengen cepet cair yah ke rentenir mba, tapi kebanyakan ke rentenir sih mbak soalnya lebih gampang dan gak ribet kaya di bank tapi bunganya lumayan tinggi. Jadi, sebelum adanya unit BKD, masyarakat biasanya meminjam uang ke rentenir dengan bunga tinggi. (Wawancara dengan Ibu Korisah, 10 Mei 2022)

Jadi kesimpulan dari pernyataan Ibu Korisah terkait kondisi sebelum adanya unit usaha BKD yang dikelola BUMDes Grinting adalah masyarakat meminjam uang ke rentenir dengan bunga tinggi. Apalagi sekarang sudah marak pinjaman online yang sangat rentan terhadap tindak kriminal.

f) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Disiplin Bayar Pajak Kendaraan

Kondisi sebelum adanya BUMDes yang membentuk unit kesamsatan, masyarakat membayar pajak melalui Kantor Samsat secara langsung. Dengan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengantri terlebih dahulu. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat tidak disiplin bayar pajak kendaraan. Berikut adalah wawancara penulis dengan pelanggan unit kesamsatan dalam BUMDes Grinting :

“Sebelum adanya unit kesamsatan masyarakat bayar pajak kendaraan di kantor pajak langsung mba sedangkan masyarakat kebanyakan punya kesibukan sendiri-sendiri”. (Wawancara dengan Bapak Sidik Hartono, 06 Mei 2022)

Jadi kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah masyarakat membutuhkan jasa pelayanan pajak kendaraan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

g) Petani Beli Pupuk Non-subsidi Dengan Harga yang Relatif Mahal

Sebelum adanya unit penyedia pupuk subsidi yang dibentuk oleh BUMDes Grinting, para petani membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Grinting bermatapencarian sebagai petani jadi keberadaan program pemberdayaan yang dapat memberikan akses terhadap pelayanan pupuk subsidi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para petani. Hal ini juga selaras dengan wawancara kepada Bapak Tanali selaku petani sekaligus pelanggan unit KPL :

“Petani biasanya beli pupuknya di toko biasa yang harganya lebih mahal karena kan gak disubsidi pemerintah, selisishnya bisa sampe 50 ribu mba perkantong itukan lumayan banget apalagi petani itu butuh pupuk gak cuma satu dua kantong tapi banyak mba jadi keberadaan pupuk subsidi sangat membantu petani mba”. (Wawancara dengan Bapak Tanali, 24 April 2022)

5. Kondisi Sesudah Adanya BUMDes Grinting

Setelah mengetahui kondisi yang menggambarkan sebelum adanya BUMDes Grinting. Berikut adalah kondisi sesudah adanya unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes Grinting untuk pemberdayaan dan memberikan akses pelayanan kepada masyarakat serta pengembanagan potensi kemampuan ekonomi masyarakat :

a) Unit Usaha Pengelolaan sampah

Pada tanggal 1 Januari 2017 Unit Usaha Pengolahan Sampah resmi masuk dalam unit usaha BUMDes Grinting. Jam operasional Unit Usaha Pengelolaan Sampah dimulai pada pukul 07.00 WIB setiap hari. Penarikan retribusi perbulan adalah Rp. 15.000,- /pelanggan. Jumlah pelanggan sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 9.021 pelanggan. Pendapatan bersih Unit Pengelolaan Sampah rata-rata perbulan : Rp. 5.000.000,-. Setelah adanya unit usaha tersebut pengelolaan sampah dilakukan oleh petugas yang kemudian didaur ulang ke tempat pembuangan akhir. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Watimi selaku pelanggan unit usaha pengelolaan sampah, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya BUMDes, masyarakat biasanya buang sampah sembarangan mbak di area persawahan yang menimbulkan bau tidak sedap. Namun, setelah adanya BUMDes pengelolaan sampah dilakukan rutin setiap hari oleh petugas sampah. Terus diangkut ke pembuangan akhir Desa Grinting jadi lebih bersih mbak”. (Wawancara dengan Ibu Watimi, 25 April 2022)

Gambar 1.7

Kondisi area persawahan setelah adanya BUMDes Grinting



Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022

Setelah adanya unit usaha pengelolaan sampah secara tidak langsung telah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

kebersihan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan. Area persawahan yang dulu kumuh akibat tumpukan sampah sekarang sudah bersih dari sampah sehingga lingkungan pun menjadi asri. Udara pun semakin bersih dari polusi pembakaran sampah karena, masyarakat sudah tidak melakukan cara tersebut untuk membersihkan sampah. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama pembentukan unit usaha pengelolaan sampah oleh BUMDes Grinting.

b) Unit Usaha Pengelolaan pasar

Pada tanggal 1 Januari 2017 Unit Usaha Pengelolaan Pasar resmi masuk dalam unit usaha BUMDes Grinting. Jam operasional Unit Usaha Pengelolaan Pasar dimulai pada pukul 05.00 WIB setiap hari. Penarikan retribusi perhari adalah : Rp. 2.000 /per pedagang. Pendapatan bersih Unit Usaha Pengelolaan Pasar rata-rata perbulan Rp. 1.900.000,- Adanya pengelolaan pasar desa bertujuan untuk menghindari pungli sewa tempat dan memfasilitasi keamanan agar tidak terjadi kemacetan serta menjaga barang/kendaraan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Kasnah selaku anggota pedagang Unit Usaha Pengelolaan Pasar beliau mengatakan bahwa :

“Setelah adanya unit pengelolaan pasar yang dibuat bumdes pasar lebih tertata, sistem sewa, keamanan, dan kebersihan dikelola penuh oleh BUMDes sehingga tidak terjadi pungli dan masyarakat lebih aman karena udah ada Linmas yang menertibkan keamanan masyarakat”.
(Wawancara dengan Ibu Kasnah, 26 April 2022)

Menurut teori Jim Ife salah satu tahap proses pemberdayaan adalah *Protecting* atau perlindungan. Dalam hal ini BUMDes Grinting lembaga yang mengatur proses pemberdayaan tingkat desa telah melakukan *Protecting* dengan cara melindungi masyarakat dari aksi pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu BUMDes juga ingin melindungi masyarakat dari aksi-aksi kriminalitas yang sering terjadi di area pasar seperti pencopetan, pencurian, penjambretan dan sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pembentukan unit usaha pengelolaan pasar ini, efektif menekan angka kriminalitas yang sering terjadi di Desa Grinting. Bahkan sakarang BUMDes Grinting telah bekerja sama dengan Linmas (Perlindungan Masyarakat) untuk menjaga keamanan.

c) Unit Usaha Lumbung Pangan

Pada tanggal 1 Januari 2017 Unit Usaha Lumbung Pangan resmi masuk dalam unit usaha BUMDes Grinting. Jumlah nasabah sampai dengan bulan ini sebanyak 80 anggota. Pendapatan Unit Lumbung Pangan pertahun 2020 Rp. 32.000.000,-. Dampak dari adanya Unit Usaha Lumbung Pangan juga diungkapkan oleh bapak Tanali selaku petani Desa Grinting :

“Jadi masyarakat Desa Grinting itu kan kebanyakan petani, sehingga kalo lagi musim panen itu berlimpah hasil padi tapi kalo lagi musim pancaroba tidak jarang petani yang kesulitan dalam hal perekonomian karena tidak bisa mengelola hasil panen. Sehingga keberadaan unit usaha lumbung pangan sangat cocok untuk masyarakat Desa Grinting”. (Wawancara dengan Bapak Tanali, 24 April 2022)

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pembentukan suatu program pemberdayaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah dibuktikan oleh BUMDes Grinting dengan membentuk Unit Usaha Lumbung Pangan yang keberadaannya sangat cocok untuk masyarakat Desa Grinting karena, sebagian masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama antara masyarakat dengan BUMDes Grinting untuk selalu mengadakan musyawarah terkait dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Agar BUMDes Grinting dapat membuat program pemberdayaan yang berdampak baik bagi masyarakat Desa Grinting.

d) Unit Usaha Kelompok Perempuan (Grinting Food)

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Ibu Darmi selaku perwakilan masyarakat dan anggota UMKM dari unit usaha kelompok perempuan beliau mengatakan bahwa :

“Setelah adanya unit usaha perempuan masyarakat jadi tau tentang berwirausaha ada yang jualan keripik telur asin, ada yang bisa bikin bolu dari daun kelor, ada yang bikin keripik daun kelor. Kalo saya itu bikinya naget bandeng mba, kebetulan suami saya nelayan jadi ikanya saya olah. Pokoknya kaum perempuan jadi lebih kreatif mba, dari jualan ini juga bisa nambah-nambah uang belanja”. (Wawancara dengan Ibu Darmi, 05 Mei 2022)

Setelah adanya unit usaha tersebut, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang pentingnya berwirausaha dan menjadikan kaum perempuan lebih produktif. Dari sini kaum perempuan bisa menambah pundi-pundi pendapatan dari hasil jualan tersebut. Tujuan pembentukan unit usaha ini bermula dari keresahan Ibu Ajeng Kartini selaku Kepala Unit Usaha Kelompok Perempuan terhadap kegiatan kaum perempuan di Desa Grinting yang hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga atau petani. Sedangkan Ibu Ajeng Kartini melihat begitu besar potensi yang dimiliki kaum perempuan di Desa Grinting, sehingga ide tersebut di tuangkan dalam program pemberdayaan BUMDes yang dinamai Grinting Food.

Gambar 1.8
Produk Olahan Makanan Khas Grinting Food



Sumber : Instagram Grinting Food Tahun 2021

Saat ini sudah ada beberapa produk olahan makanan khas Desa Grinting yang diproduksi oleh kaum perempuan yang tergabung dalam unit usaha kelompok perempuan. Olahan makanan tersebut terbuat dari bahan-bahan makanan yang menjadi hasil dari masyarakat atau yang mudah didapat di Desa Grinting seperti ikan bandeng, telur asin, dan daun kelor. Kemudian diolah menjadi makanan khas seperti *nugget bandeng*, *sambel bandeng*, *keripik telur asin*, *kerupuk daun kelor* dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan perkembangan unit usaha kelompok perempuan saat ini sedang merintis kembali usahanya, setelah tiga tahun kemarin mengalami

penurunan omset akibat pandemi covid-19. Unit usaha ini telah kehilangan pasar akibat kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penularan covid-19. Seperti yang diketahui bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha kelompok perempuan didistribusikan ke berbagai tempat seperti rest area, bandara dan toko oleh-oleh lainnya sempat ditutup. Sehingga unit usaha ini mengalami penurunan omset yang cukup besar. Namun, saat ini sudah mulai aktif kembali dalam hal produksi makanan khas tersebut.

e) Badan Kredit Desa

Untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya Unit BKD (Badan Kredit Desa) penulis melakukan wawancara kepada Ibu Korisah beliau mengatakan bahwa :

“Setelah adanya BKD masyarakat jadi lebih mudah kalo mau minjem uang dan prosesnya gampang dan yang penting bunga nya rendah mba”. (Wawancara dengan Ibu Korisah, 10 Mei 2022)

Jadi, sebelum adanya unit BKD, masyarakat biasanya meminjam uang ke rentenir dengan bunga tinggi. Namun, setelah adanya unit BKD masyarakat dapat meminjam uang dengan mudah dan dengan bunga rendah yaitu hanya sebesar 2.5% dari total pinjaman. Pembentukan BKD bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan proses mudah dan bunga rendah. Hal ini tentu saja sangat membantu masyarakat dalam menjalankan laju perekonomian. Agar peminjaman uang berjalan dengan baik tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu terbebas dari pinjaman lainnya seperti kredit kendaraan bermotor, pinjaman pegadaian dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar angsuran masyarakat dapat berjalan dengan baik, kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ketika ingin meminjam uang harus melunasi hutang sebelumnya terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, pembentukan unit BKD sangat membantu masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi ke rentenir seperti pinjaman online dan sebagainya.

f) Kesamsatan

Pada tanggal 1 Maret 2017 Unit Kesamsatan resmi masuk dalam unit usaha BUMDes Grinting. Jam operasional unit kesamsatan dimulai pada pukul 07.00 WIB setiap hari. Penarikan jasa perpajakan adalah Rp.35.000,- rata-rata perhari lima pelanggan. Pendapatan bersih unit kesamsatan perbulan Rp.1.900.000,-. Sekarang, masyarakat tak perlu mengantri untuk bayar pajak kendaraan bermotor setelah adanya fasilitas kesamsatan di BUMDes Grinting. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Sidik Hartono selaku pelanggan unit kesamsatan beliau mengatakan bahwa :

“Keberadaan unit samsat ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan jasa pelayanan pembayaran pajak”. (Wawancara dengan Bapak Sidik Hartono, 06 Mei 2022)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, pembentukan unit kesamsatan sangat membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Dengan proses cepat dan tidak antri masyarakat dapat dengan mudah membayar pajak. Hanya dengan membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat sudah dapat mengakses pelayanan pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang disiplin bayar pajak. Setelah penulis melakukan penelitian langsung di kantor BUMDes bahwa pengadaan unit kesamsatan efektif bagi masyarakat dalam proses pembayaran pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam disiplin bayar pajak.

g) Unit Usaha Kios Pupuk Lengkap

Pengadaan program unit usaha Kios Pupuk Lengkap (KPL) dibentuk oleh BUMDes Grinting pada tanggal 01 Januari 2019. Unit usaha ini baru terealisasi kurang lebih sudah 3 tahun akan tetapi pendapatan meningkat setiap tahun. Bahkan tertinggi kedua setelah unit pengelolaan sampah pada tahun pertama dibangun yaitu Rp. 37.655.000 /tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa para petani atau masyarakat sangat berantusias dengan keberadaan unit

usaha kios pupuk lengkap. Selain karena harganya yang murah, kualitas pupuk pun sama dengan yang ada di toko-toko pupuk lainnya.

Gambar 1.9
Proses Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani



Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2022

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan oleh pengurus unit KPL yaitu edukasi kepada para petani tentang syarat yang harus dipenuhi petani saat ingin membeli pupuk subsidi. Hal ini penting dilakukan karena kebanyakan petani tidak dapat membedakan antara pembelian pupuk subsidi dengan pembelian pupuk di toko biasa yang non subsidi. Sehingga ketika terjadi proses pendistribusian pupuk banyak para petani yang miskomunikasi kepada pengurus BUMDes. Sebenarnya syarat pendistribusian pupuk subsidi yang harus dipenuhi petani hanya kartu tani beserta buku tabungannya. Didalam kartu tani tersebut sudah tercantum kuota pupuk subsidi yang boleh didistribusikan kepada petani. Besaran kuota tersebut sudah diperhitungkan oleh pemerintah sesuai dengan luasnya sawah yang dimiliki petani saat mendaftar pembuatan kartu tani.

Hal ini lah yang terkadang memicu kesalahpahaman antara petani dan pengurus BUMDes. Kesalahpahaman tersebut terjadi saat petani ingin membeli pupuk melebihi batas kuota yang ada di kartu tani. Hal ini tidak boleh dilakukan mengingat pengadaan pengadaan unit KPL bertujuan untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani bukan semata-mata untuk

memperjualbelikan pupuk dengan bebas. Kemudian jika hal ini dilakukan dapat memicu masalah baru yaitu para petani bisa saja menjual kembali pupuk subsidi dengan harga yang lebih mahal. Namun terlepas dari masalah tersebut keberadaan pendistribusian pupuk subsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mayoritas masyarakat Desa Grinting bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan seperti ini wajar terjadi kendala dalam proses pemberdayaan akan tetapi bagaimana masalah ini bisa menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pengurus BUMDes.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi anggota di setiap unit usaha, penulis membuat tabel kesimpulan kondisi sebelum dan sesudah adanya unit usaha dalam BUMDes Grinting yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.15
Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes Grinting

No.	Unit Usaha	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
1.	Unit Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat membuang sampah di area persawahan. - Lingkungan kotor/tidak bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuangan sampah dilakukan ditempat khusus pembuangan akhir sampah. -Lingkungan bersih.
2.	Unit Pengelolaan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Sarat pungli - Minim keamanan - Terjadi kemacetan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa tempat, kebersihan dan keamanan dikelola penuh oleh BUMDes Grinting.
3.	Unit Lumbung Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebatas pinjaman uang - Masyarakat melunasi pinjaman dengan uang. - Jangka waktu bulanan/yang sudah ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman berupa padi/gabah. - Masyarakat dapat melunasi pinjaman dengan padi/gabah. - Jangka waktu pelunasan saat musim panen tiba.

4.	Unit Usaha Kelompok Perempuan	- Minimnya edukasi tentang wirausaha bagi kaum perempuan. - Kegiatan kaum perempuan hanya sebatas bertani dan menjadi ibu rumah tangga	- Kaum perempuan lebih produktif dan kreatif. - Dapat menambah penghasilan bagi kaum perempuan.
5.	Unit BKD (Badan Kredit Desa)	- Masyarakat meminjam uang ke rentenir. - Bunga tinggi - Proses ribet	- Masyarakat meminjam uang ke BKD. - Bunga rendah - Proses mudah
6.	Unit kesamsatan	- Masyarakat harus mengantri saat bayar pajak. - Memerlukan waktu yang lama.	- Masyarakat dapat membayar pajak di BUMDes tanpa harus mengantri. - Dapat menyingkat waktu
7.	Unit Kios Pupuk Lengkap	- Pembelian pupuk ke toko biasa. - Harga (non-subsidi) relatif mahal.	- Pembelian menggunakan kartu tani ke BUMDes. - Harga subsidi lebih murah.

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021

Dalam proses kegiatan pemberdayaan agar berjalan sesuai dengan visi dan misi BUMDes Grinting telah membuat indikator atau tolak ukur keberhasilan yang harus dicapai. Hal ini dilakukan agar pengurus BUMDes dapat mengetahui tujuan program-program pemberdayaan. Berikut program kegiatan serta indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.16
Program Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Unit Usaha

No	Program/Kegiatan	Output	Indikator Keberhasilan
----	------------------	--------	------------------------

1.	Unit Usaha pengelolaan Sampah	- Pendapatan finansial: 60jt/tahun	- Perubahan sikap perilaku masyarakat lebih sadar tentang sampah - Desa menjadi bersih, indah dan sehat
2.	Unit Usaha Pasar Desa	- Pendapatan finansial: 24jt/tahun	-Ketertiban pedagang dan pembeli -Jaminan distribusi kebutuhan masyarakat
3.	Unit Usaha Lumbung Pangan	- Pendapatan finansial: 100jt/tahun	-Terfasilitasinya kebutuhan modal bagi pelaku usaha pertanian
4.	Unit Kelompok Perempuan	-Pendapatan finansial : 24jt/tahun	- Terfasilitasinya UMKM dalam pendistribusian produk olahan makanan khas Desa Grinting.
5.	Unit Usaha Badan Kredit Desa	- Pendapatan finansial: 50jt/tahun	-Terfasilitasinya kebutuhan modal bagi pelaku usaha kecil menengah
6.	Unit Usaha Kesamsatan	- Pendapatan finansial: 50jt/tahun	-Terfasilitasinya perpajakan kendaraan bermotor dengan pelayanan prima
7.	Unit Usaha Kios Pupuk	- Pendapatan	-Terfasilitasinya kebutuhan pupuk

Lengkap	finansial: 50jt/tahun	bersubsidi bagi petani
---------	--------------------------	------------------------

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2020.

Tujuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan BUMDes Grinting melalui unit usaha tentu membawa hasil yang sesuai dengan wacana pemerintah desa. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan peningkatan pendapatan BUMDes setiap tahunnya. Berikut adalah tabel pendapatan BUMDes Grinting dari tahun 2017-2020 yaitu :

Tabel 1.17
Omset Usaha Tahun Dari 2017 s/d 2020

No	Unit Usaha BUMDes	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Unit Pengelolaan Sampah	34.608.000	55.140.000	60.960.000	60.960.000
2.	Unit Pasar Desa	23.255.000	30.475.000	25.200.000	23.000.000
3.	Unit Lumbung Pangan	6.250.000	13.000.000	33.600.000	32.000.000
4.	Unit Usaha Kelompok Perempuan	-	8.600.000	12.000.000	28.500.000
5.	Unit Badan Kredit Desa	-	7.540.000	16.596.000	14.642.000
6.	Unit Kesamsatan	25.941.000	29.968.000	24.200.000	23.950.000
7.	Unit Kios Pupuk Lengkap	-	-	-	37.655.000
	JUMLAH TOTAL	96.304.000	144.793.000	172.056.000	220.707.000

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan melalui unit usaha dalam BUMDes mengalami peningkatan dari segi pendapatan setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa keberadaan BUMDes sangat membantu masyarakat serta, sistem pengelolaannya yang baik. Kemudian pentingnya kerja sama antara pengurus BUMDes dengan masyarakat juga sangat berperan aktif

dalam merealisasikan program-program pemberdayaan melalui unit usaha. Dalam pembagian hasil usaha BUMDes Grinting telah menentukan atau mengkategorikan dalam tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.18
Alokasi Dana Pendapatan BUMDes Grinting

No.	Alokasi Dana	Jumlah / persen
1.	Penambahan Modal Usaha	25 %
2.	Pendapatan Asli Desa	35%
3.	Insentif Pengurus	35%
4.	Dana sosial	5%

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut pembagian hasil usaha BUMDes Grinting bertujuan agar pendapatan BUMDes tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pembagian tersebut ditotal dari keseluruhan pendapatan BUMDes Grinting. Dari tabel tersebut terdapat alokasi untuk dana sosial yang ditujukan sebagai contoh sumbangan untuk masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pengurus BUMDes Grinting dengan peran aktif masyarakat menjadi sebuah kunci utama dalam keberhasilan dari adanya program-program pemberdayaan. Mulai dari pembuatan atau rancangan program pemberdayaan yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sampai pada proses realisasi program pemberdayaan selalu melibatkan kedua unsur utama tersebut. sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Kemudian dalam proses pengelolaan harus diimbangi dengan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Grinting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. hal ini sesuai dengan konteks pemberdayaan yaitu terdapat timbal balik yang positif diantara kedua unsur utama tersebut.

B. Implikasi Teori Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Grinting berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife. Implementasi teori tersebut dibuktikan dari tiga tahapan teori yaitu sebagai berikut:

1. *Enabling*

Salah satu faktor pendorong keberhasilan BUMDes Grinting dalam memberdayakan masyarakat adalah faktor demografi dimana luas wilayah dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan program pemberdayaan. Semakin luas wilayah suatu daerah dengan dibarengi oleh tingkat kependudukan yang cukup padat maka semakin banyak pula kebutuhan akan akses pelayanan dan program pemberdayaan. Dari potensi yang dimiliki, BUMDes Grinting mencoba untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui program-program pemberdayaan atau melalui pelayanan di unit usaha. Semua program-program pemberdayaan yang dibuat BUMDes Grinting telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan kebersihan, pelayanan untuk para pedagang, pemberdayaan kaum perempuan, pelayanan untuk para petani, pelayanan pajak, serta pelayanan pinjaman dana dengan bunga rendah. Berdasarkan hal tersebut kaitanya dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife BUMDes Grinting telah melakukan *enabling* atau menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

2. *Empowering*

BUMDes Grinting telah melakukan langkah-langkah nyata untuk memberdayakan serta memperkuat daya yang dimiliki masyarakat melalui unit usaha. Langkah-langkah tersebut menyangkut penyediaan berbagai *input* (masukan) serta pembukaan akses ke dalam beberapa *opportunities* (peluang) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Seperti untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan BUMDes Grinting membuat unit usaha pengelolaan sampah. Untuk memfasilitasi para pedagang di pasar BUMDes Grinting membuat unit usaha pengelolaan pasar serta menugaskan Linmas untuk menjaga keamanan. BUMDes Grinting juga menaruh kepedulian pada kaum perempuan sehingga membuat unit kelompok perempuan untuk mengedukasi kaum perempuan tentang pentingnya berwirausaha. BUMDes Grinting juga memberikan fasilitas kepada petani karena seperti yang diketahui mayoritas masyarakat Desa Grinting bermatapencaharian sebagai petani. Dengan adanya unit yang memberikan fasilitas peminjaman gabah/padi

dan pengadaan pupuk subsidi pasti akan sangat membantu para petani. Tidak hanya itu BUMDes Grinting juga memfasilitasi masyarakat agar tertib bayar pajak dengan membuat unit kesamsatan. Terakhir untuk memberikan pelayanan peminjaman dana BUMDes Grinting membuat unit BKD (Badan Kredit Desa) untuk masyarakat yg membutuhkan pinjaman dengan bunga rendah. Berdsarkan hal tersebut kaitanya dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife BUMDes Grinting telah melakukan *empowering* atau memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

3. *Protecting*

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Grinting sejatinya adalah untuk melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang atau eksploitasi terhadap yang lemah. Apabila unit usaha tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat maka akan berakibat pada tertindasnya masyarakat kecil yang tidak mempunyai modal sebagai syarat untuk menguasai perekonomian. Pembuatan program pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Grinting selain karena ingin memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat juga karena ingin melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat memperlemah masyarakat. Sebagai contoh dibuatnya unit usaha bidang jasa atau pinjaman seperti ; pengelolaan sampah, pengelolaan pasar, kesamsatan, BKD dan lumbung pangan. Agar masyarakat terhindar dari pungli dan bunga pinjaman tinggi yang telah banyak beredar dimasyarakat. Selanjutnya pembuatan unit usaha bidang pemberdayaan seperti kelompok usaha perempuan, untuk melindungi dan memperkuat kaum perempuan agar mandiri dalam berwirausaha. Terakhir pada penyediaan akses pendistribusian pupuk subsidi pada unit kios pupuk lengkap, untuk melindungi para petani dari permainan harga pupuk di toko-toko penjualan kebutuhan pertanian yang marak terjadi. Berdasarkan hal tersebut kaitanya dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife, BUMDes Grinting telah melakukan *protecting* atau perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah dalam konsep pemberdayaan.

Dengan demikian tujuan akhir pemberdayaan menurut teori yang dikemukakan oleh Jim Ife adalah memandirikan masyarakat, memperkuat masyarakat, melindungi masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh BUMDes Grinting

diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita BUMDes Grinting yang tertuang dalam visi BUMDes yaitu mewujudkan desa mandiri berdikari. Penulis telah membuat tabel kesimpulan implementasi teori yang dikemukakan oleh Jim Ife yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.19
Relevansi Teori dengan Langkah-langkah BUMDes

Tahapan Teori	Isi Teori	Langkah-langkah BUMDes	Penilaian
Enabling	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.	Membuat unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Relevan
Empowering	Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.	Penyediaan dan pembukaan akses pelayanan kepada masyarakat melalui unit usaha.	Relevan
Protecting	Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah.	Pembuatan unit usaha agar tidak dikelola secara mandiri oleh masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat memperlemah masyarakat.	Relevan

Sumber : Profil BUMDes Grinting Tahun 2021

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, penulis menyimpulkan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari peningkatan pendapatan BUMDes Grinting setiap tahun dan berjalannya program-program pemberdayaan BUMDes. Jadi, kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak keberadaan BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Grinting, berperan dalam pemberdayaan dan pemberian akses pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan potensi kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. BUMDes Grinting juga berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dengan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya. Melalui tujuh unit usaha BUMDes Grinting telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Grinting dalam berbagai aspek, seperti pelayanan kebersihan, pengelolaan pasar sebagai pusat perekonomian, pemberian fasilitas pinjaman padi/gabah untuk para petani, peningkatkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan khususnya bagi kaum perempuan, pemberian akses pelayanan pinjaman dana dengan bunga rendah, pemberian akses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta pengadaan pendistribusian pupuk subsidi. Semua program-program pemberdayaan yang dibuat BUMDes Grinting melalui unit usaha telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Grinting.
2. Proses pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Grinting, selalu melibatkan peran aktif masyarakat dalam menentukan atau pun membuat program pemberdayaan. Hal ini dilakukan mengingat, pentingnya kerja sama antara pengurus BUMDes dengan masyarakat melalui musyawarah sehingga program pemberdayaan yang telah dibuat dapat tepat sasaran membantu masyarakat. Tidak hanya itu, dalam proses pemberdayaan BUMDes Grinting terdapat beberapa faktor

pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya, diantaranya ada faktor pendorong BUMDes Grinting yaitu bonus demografi, siklus ekonomi desa yang dinamis dan pemerintah desa yang responsif. Sementara untuk faktor penghambat BUMDes Grinting yaitu keterbatasan modal, keterbatasan SDM, sikap dan perilaku masyarakat, serta persaingan produk/jasa. Faktor penghambat yang terjadi dalam proses pemberdayaan di Desa Grinting menjadi fokus atau tugas utama pengurus BUMDes dalam memperbaiki kualitas pelayanan atau pemberdayaan. Sementara faktor pendorong atau pendukung menjadi bonus yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai kebermanfaatan untuk masyarakat Desa Grinting secara luas.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Grinting

Perlunya menjalin relasi dengan berbagai sumber dalam hal ini sumber yang mempunyai *Power* atau kekuatan seperti perusahaan, instansi atau lembaga yang mampu melebarkan unit usaha dalam BUMDes Grinting. Hal ini juga dapat menjadi referensi BUMDes dalam mengembangkan unit usaha.

2. Bagi BUMDes Grinting

- a) Harus selalu meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang disampaikan melalui Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. agar masyarakat merasa nyaman ketika melakukan proses pemberdayaan.
- b) Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes Grinting. Agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat secara umum.
- c) BUMDes Grinting harus bisa membaca peluang pasar dari program, produk hingga jasa yang dihasilkan.
- d) Perlunya pelatihan IPTEK kepada pengelola BUMDes Grinting agar pengelola dapat memberikan kualitas yang maksimal dalam pembuatan laporan BUMDes.

3. Bagi masyarakat

- a) Masyarakat harus mempunyai aspek keterbukaan terhadap program-program pemberdayaan yang telah dibuat oleh BUMDes Grinting.

- b) Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam mensosialisasikan program-program BUMDes kepada masyarakat lain yang belum mengetahui keberadaan BUMDes Grinting.
 - c) Konsistensi masyarakat diperlukan dalam keikutsertaan program-program pemberdayaan, serta ikut mensosialisasikan program-program pemberdayaan di semua unit usaha agar sasaran BUMDes Grinting dapat menjangkau semua masyarakat Desa Grinting.
4. Bagi Penulis/peneliti selajutnya

Ketika melakukan penelitian di Desa Grinting hendaknya mempelajari dan mengetahui karakteristik masyarakat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sifat dan karakteristik masyarakat Desa Grinting yang dinamis dalam artian penulis/peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Sehingga penelitian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Brawijaya, U. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi, H. (2012). *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Gunawan, S. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Huberman, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Ife, J. (2008). *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Subadi. (2006). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: University Press.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* . Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset; Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yustika, A. E. (2003). *Negara VS Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Referensi Jurnal :

- Dewi, A. K. (2014). "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Seta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Jurnal UB*, Vol. 5, No. 1, hal 1-15.
- Haridison. (2017). "Modal Sosial Dalam Pembangunan. *JISPAR : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan*", Vol. 2, No. 1, hal 1-20.

- Hasanah. (2007). "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)". *At-Taqaddum*, Vol. 1, No. 2, hal 1-12.
- Herry, A. (2015). "*Jurnal Ilmiah*". *CIVIS*, Vol. V, No. 1, hal 1-744.
- Rijali, A. (2018). "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, hal 1-35.
- Rismawati. (2018). "Peranan BUMDes Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal". *Jurnal Walisongo*, Vol. 3, No. 10, hal 1-58.
- Rosaliza, M. (2016). "Modal Sosial Dan Budaya Dalam Pembangunan Desa". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 13, No. 1, hal 1-25.

Referensi Skripsi :

- Evliyani. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wahyaru Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung.
- Firmansyah, A. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hartini. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kabupaten Polman (Tinjauan Ekonomi Islam). *Skripsi* IAIN Parepare.
- Ismy, W. S. (2019). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Pangan Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lampisang Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Kandra, R. (2019). Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. *Skripsi* UIN Sumatera Utara Medan.
- Kobit, A. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Budidaya Ikan Nila Kabupaten Muaro Jambi. *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Munawarah. (2019). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nofiratullah. (2018). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Romadhon. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tero. *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Sarah, A. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Hono Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi IAIN Palopo*.

Referensi Undang-Undang Dan Catatan Desa :

Khalimi. (2020). *Laporan Perkembangan Pendapatan BUMDes Grinting*. Brebes: Arsip Desa Grinting.

Profil BUMDes Grinting 2020 - 2021

SID PRODESKEL (Profil Desa/Kelurahan Grinting 2020 - 2021

Undang-Undang PERMENDES No. 6 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 Ayat (1) Tentang Pengaturan BUMDes.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2010 Tentang Peraturan Dalam Negeri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titis Karlana
TTL : Brebes, 07 Oktober 1998
Alamat : Desa Grinting, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes
Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan/Prodi : Sosiologi

Pendidikan :

- a) SD : SD N Grinting 01
- b) SMP : SMP N 2 Bulakamba
- c) SMA : SMA N 1 Tanjung

Pengalaman :

- a) Mengajar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini 2017
- b) Anggota Organisasi Daerah KPMDB 2018
- c) Anggota PMII FISIP UIN Walisongo Semarang

Email : titiskarlana8@gmail.com

Instagram : lenunut

Motto : Berbuat baik kepada setiap orang, niscaya Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 10 Juni 2022



Titis Karlana

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan informan Dadi Fakur, S.P



Lampiran 2 Wawancara dengan informan Ibu Watimi



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Ibu Kasnah



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Bapak Sidik Hartono



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Ibu Darmi



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Ibu Korisah



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Bapak Tanali



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Bapak Septino Restu



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Bapak Sutambi



Lampiran 1 Wawancara dengan informan Bapak Kisnodo

